

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA

2016

PT. BANK BPD DIY

TATA KELOLA

Penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi terbentuknya infrastruktur perbankan dan budaya perusahaan yang kokoh. Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan, PT. Bank BPD DIY melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

PT. Bank BPD DIY menerapkan pelaksanaan tata kelola berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Independensi**, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, Bank telah melakukan penilaian sendiri terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, PT. Bank BPD DIY melaksanakan penerapan tata kelola yang terwujud dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
4. Penerapan manajemen risiko
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS TATA KELOLA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, PT. Bank BPD DIY secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk mengukur pelaksanaan tata kelola terhadap kebijakan – kebijakan yang berlaku. Hasil penilaian sendiri atas tata kelola PT. Bank BPD DIY pada akhir tahun 2016 mencapai peringkat komposit “Low”.

Rincian hasil penilaian sendiri pada posisi Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Faktor Penilaian	Skor (1-5)	Bobot	Skot Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,92	10%	0,19
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,92	20 %	0,38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,92	10%	0,19
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,40	10%	0,14
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,92	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,20	5%	0,11
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,40	5%	0,07

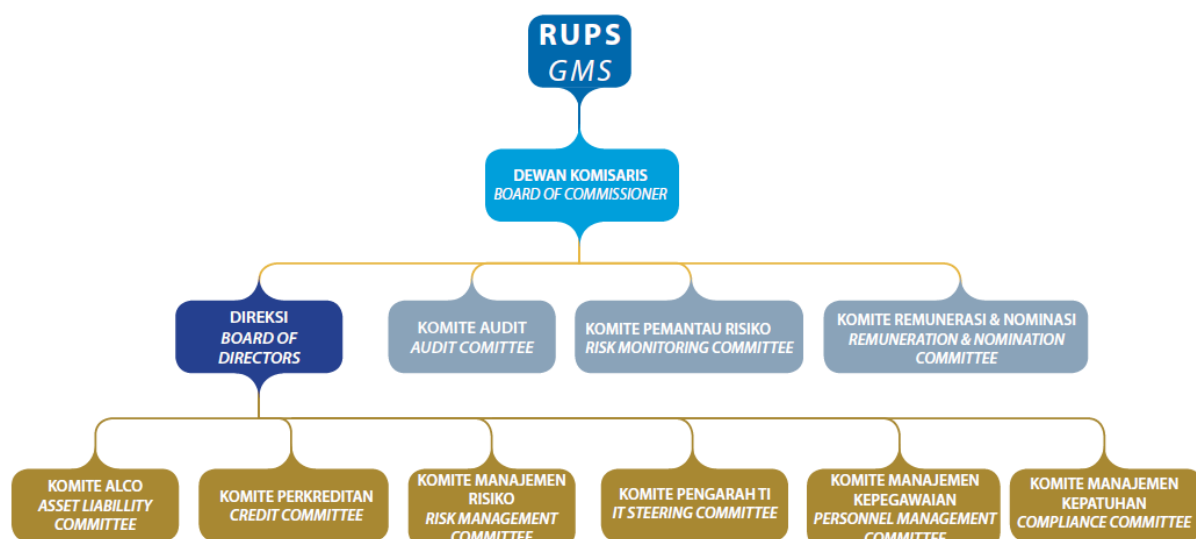
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	2,20	7,5%	0,17
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)	1,92	7,5%	0,14
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	1,40	15%	0,21
11	Rencana Strategis Bank	1,92	5%	0,10
Total Skor: 1,80				
Peringkat: 1				

Index Self Assessment GCG Score posisi Desember selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	2014	2015	2016
<i>Index Self Assessment GCG Score</i>	1,88	1,81	1,80
Predikat	2	2	1

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BANK BPD DIY

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, struktur organisasi GCG PT. Bank BPD DIY disusun sebagai berikut :



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham menggunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang Lingkup RUPS

Berdasarkan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013, RUPS meliputi RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya/Luar Biasa. Ruang lingkup RUPS meliputi:

1. Penilaian laporan pertanggung jawaban Direksi.
2. Persetujuan serta pengesahan Neraca dan Rugi/Laba Bank.
3. Pemilihan/pencalonan, penilaian Direksi.
4. Penentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Saham yang meliputi Daftar Saham, pemindah tanganan saham, duplikat saham, dan sebagainya.
5. Pembahasan hal-hal yang prinsip dan mendasar bagi kelangsungan pengelolaan Bank.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2016

Selama tahun 2016, RUPS dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu :

Tanggal Pelaksanaan	Agenda RUPS	Keputusan RUPS
08 April 2016	<ul style="list-style-type: none">• Pengesahan Laporan Keuangan• Pengesahan Modal• Penunjukan KAP	<ul style="list-style-type: none">• Mengesahkan Laporan Keuangan• Mengesahkan Modal• Menunjuk KAP

Pemegang Saham Bank BPD DIY

Sampai akhir tahun 2016, Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rupiah	%	Jumlah Lembar Saham
Pemerintah Daerah DIY	283.500.000.000	38,54	283.500
Pemerintah Kota Yogyakarta	117.000.000.000	15,90	117.000
Pemerintah Kabupaten Sleman	148.200.000.000	20,15	148.200
Pemerintah Kabupaten Bantul	88.155.000.000	11,98	88.155
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	52.338.000.000	7,11	52.338
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	46.438.000.000	6,31	46.438

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. Bank BPD DIY.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY. Susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bahwa Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif	
		Persetujuan OJK	Persetujuan RUPS
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Komisaris Utama (Independen)	Surat OJK No. S-211/KO41/2015	- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Komisaris Independen	tanggal 29 April 2015 tentang	Bank Pembangunan Daerah Daerah
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Komisaris	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris bank Saudara	Istimewa Yogyakarta Nomor 3, tanggal 6 April 2015

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, PT. Bank BPD DIY menyusun Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang meliputi hal-hal berikut :

- Ketentuan Umum
- Independensi
- Pengangkatan dan pengunduran diri
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab
- Transparansi dan larangan bagi Dewan Komisaris
- Etika dan waktu kerja
- Rapat Dewan Komisaris
- Komite-komite
- Pelaporan
- Ketentuan penutup

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013.

1. Tugas Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - c. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
 - d. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Kriteria Dewan Komisaris

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* serta mendapat persetujuan RUPS.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Lainnya dan/atau Direksi dan Pemegang Saham

Selama tahun 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan PT. Bank BPD DIY, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komisaris Independen PT. Bank BPD DIY telah memenuhi persyaratan utama yang mencakup persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan Pemegang Saham ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan Komisaris Utama selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.

3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan, maka Komisaris Utama dapat menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat.
4. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
5. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk jika terdapat perbedaan pendapat/*dissenting opinion*) dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat berita acara. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat dengan Direksi dengan sebagai berikut:

1. Pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.
2. Acara rapat/pertemuan dimaksud, ditetapkan oleh Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	9	9	100
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	9	9	100
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	9	8	90

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	6	6	100%
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	6	6	100%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	6	5	90%

Materi Rapat Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat Dewan Komisaris
29 Januari 2016	Penjelasan Perkembangan Permasalahan Hukum Kredit
30 Januari 2016	Pembahasan Tindak Lanjut <i>Prudential Meeting</i> OJK (25-01-2016)
13 Maret 2016	Pembahasan rencana materi dan waktu RUPS Tahun 2016
04 Juni 2016	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perubahan (1)
12 Juni 2016	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perubahan (2)
24 Juli 2016	Pembahasan <i>Tax Amnesti</i>
29 Juli 2016	1. Pembahasan kasus kredit 2. Pembahasan Surat Direksi terkait pergantian Pemimpin SPI
09 Oktober 2016	Pembahasan Struktur Organisasi
23 Oktober 2016	Pembahasan 25 Debitur Kredit Bermasalah dan Kredit Sektor Perhotelan

Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
12 Februari 2016	1. Pembahasan hasil penyusunan Corplan 2016 – 2020 2. Pembahasan aspek target-target Rencana Bisnis Bank 2016 3. Pembahasan hasil pemeriksaan BPK
20 Maret 2016	Pembahasan perkembangan Kasus Kredit
03 April 2016	Pembahasan persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
04 September 2016	Struktur Organisasi
03 Agustus 2016	Pembahasan aspek pemenuhan Pejabat Eksekutif yaitu Pemimpin SPI dan Pemimpin Divisi Perencanaan
07 November 2016	1. Kinerja Triwulan II dan III Tahun 2016 2. Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi 3. Rencana Bisnis Bank Tahun 2017

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap Direksi.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut :

No	Tanggal	Perihal
1		
2		
3		

Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa kali pelatihan. Adapun pelatihan yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Anggota Dewan Komisaris	Jenis Pelatihan
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	Pelatihan Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) SMR Level 2
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	1. <i>High Level Seminar & Workshop</i> Transformasi BPD 2. Seminar Nasional & Rakernas FKDK/P
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Pelatihan Pencegahan Kejahatan Perbankan melalui Pengawasan Internal Terpadu

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan Pemegang Saham dalam RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris :

- Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengevaluasi system penggajian, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris.

- Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang remunerasi Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mengusulkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan menjalankan tugas-tugasnya, Direksi telah membentuk, antara lain:

1. SPI (Satuan Pengawasan Intern)
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
3. UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)
4. Komite Manajemen Kepegawaian
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Kebijakan Kredit
7. ALCO (*Asset Liability Committee*)
8. Komite Kepatuhan

Jumlah dan Komposisi Direksi

Selama tahun 2016, tidak terdapat perubahan pada susunan Direksi PT. Bank BPD DIY yang terdiri dari 4 (empat) orang. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bahwa:

1. Bank wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.

Jumlah dan komposisi Direksi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif	
		Persetujuan OJK	Persetujuan RUPS
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	Direktur Utama	Surat OJK No. S-244/KO41/2014 tanggal 8 Oktober 2014	-Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tanggal 8 September 2014.
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Direktur Pemasaran	tentang Laporan Pengangkatan Direksi bank Saudara	-Akta Addendum Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, Nomor 6 tanggal 12 September 2014
Drs. Cahya Widi, M.M.	Direktur Umum		
Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Direktur Kepatuhan		

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi PT. Bank BPD DIY telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Untuk pelaksanaan tugas Direksi yang efektif, PT. Bank BPD DIY menyusun Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang meliputi hal-hal berikut :

- Ketentuan Umum
- Susunan Direksi
- Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
- Pembagian Tugas dan wewenang Direksi
- Laporan
- Tata Persuratan
- Waktu dan Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Etika Kerja Direksi
- Perjalanan Dinas
- Ketentuan Penutup

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013, yaitu antara lain:

1. Tugas Direksi:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Bank.
 - b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Bank.
 - c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Bank dan menyampaikannya kepada Komisaris.
 - d. Membuat dan memelihara risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank dengan kelaziman yang berlaku bagi Bank.
 - e. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
 - f. Memberikan pertanggungjawaban serta segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank, berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan

keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.

- g. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
 - h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau berdasarkan petunjuk RUPS.
 - i. Mengajukan kepada Dewan Komisaris usulan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.
 - j. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - l. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
2. Hak dan Wewenang Direksi:
- a. Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam pengurusan Bank.
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
 - e. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.

- f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tanggal 5 April 2013. Seluruh anggota Direksi PT. Bank BPD DIY telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* serta mendapat persetujuan RUPS.

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Direksi Lainnya dan/atau Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Selama tahun 2015, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Drs. Cahya Widi, M.M.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Drs. Santoso Rohmad, M.M.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Pernyataan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PT. BPD Bank DIY, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rapat Dewan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Setiap kebijakan dan keputusan strategis Bank diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal terjadi perbedaan. Setiap keputusan rapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.

Selama tahun 2016, Direksi telah melaksanakan sebanyak 38 rapat dengan tingkat kehadiran anggota Direksi sebagai berikut:

Anggota Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. Bambang Setiawan, Akt.	38	38	100%
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro SH.MM	38	33	87%
Drs. Santoso Rohmad, M.M	38	37	97%
Drs. Cahya Widi, M.M	38	38	100%

Materi Rapat Direksi PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat Direksi
08 Januari 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Laporan posisi keuangan 2015 meliputi (Neraca dan Laporan Laba Rugi, Rasio-rasio Keuangan, Permodalan)2. Finalisasi general audit atas laporan keuangan 2015 oleh KAP Tanzil3. Rencana Penyusunan Annual Report 20154. Timelime rencana penyelenggaraan RUPS tahunan 2016 (Agenda Utama : Laporan pertanggungjawaban Kinerja 2015)5. Rencana Kunjungan 33 Duta Besar RI ke DIY

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rencana Sosialisasi program transformasi BPDSI di DIY oleh PT. Bank BPD DIY, Asbanda dan OJK 7. Rangkaian perayaan HUT ke 55 PT Bank BPD DIY - Investing Jogja 2016 , BPD DIY, SK Sirkuit Atletik 8. Penyiapan peningkatan status menjadi BUKU 2 9. Penyiapan Infrastruktur (<i>Brainware, Software, Hardware</i>) kegiatan usaha Bank Buku 2 (bank Devisa) 10. Road map Permodalan s/d 2025 11. Perencanaan jangka panjang Infrastruktur 12. Program CSR 2016 13. Program Promosi , PR dan Advertising 2016
02 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi Draft Struktur Organisasi 2. Penyiapan peningkatan status menjadi buku 2 termasuk penyiapan infrastruksur (<i>brainware, software , hardware</i>) kegiatan usaha bank Buku 2, Laku pandai dan kegiatan Bank Devisa 3. Road permodalan s/d 2025 4. Perencanaan jangka panjang insfrastruktur 5. Program CSR 2016 6. Program promosi , Public Relation dan advertising 2016 7. Evaluasi pengendalian risiko operasional dalam transsaksi dana dan jasa dan kredit mikro 8. Sales Reward Bancassurance
03 Februari 2016	Rapat lanjutan Tanggal 2 Februari
02 Maret 2016	Evaluasi Pengelolaan Kredit Mikro
04 Maret 2016	Evaluasi Pengelolaan Kredit Mikro (Rapat Lanjutan)
08 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan temuan KAP 2. Evaluasi Pengelolaan Kredit Mikro
11 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Usulan Hadiah Undiang tabungan Sutera dan Sutera Emas 2. Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit mengenai koreksi jasprod dan Dana Kesejahteraan
16 Maret 2016	Evaluasi pengelolaan kredit Mikro
06 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Prudential Meeting tahun 2015 berdasar surat OJK No.: S 171/KO.031/2015 2. Bidang perkreditan
13 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. TindakLanjut keputusan RUPST 2. Tindak Lanjut komite kredit an PT Anugerah Arta Rista 3. Tindak Lanjut penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR)
20 April 2016	Penataan Ulang Kredit Mikro
21 April 2016	Kolektibilitas Kredit

25 April 2016	Penataan Ulang Kredit Mikro
04 Mei 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kredit dengan Bunga Single Digit 2. Implementasi KUR 3. Implementasi Ketentuan baru mengenai skim kredit mikro 4. Hubungan Komunikasidan Promosi
11 Mei 2016	Sosialisasi Kredit Mikro dan Bunga <i>Single Digit</i> PT. Bank BPD DIY
19 Mei 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status <i>Update Project Branchless Banking</i>(Laku pandai) 2. Status <i>Update Project Non Cash Payment</i> Kabupaten Kulon Progo 3. Progres Implementasi KUR dan Bunga <i>Single Digit</i> 4. Program Kredit Rakyat Jogja (Bunga 5.5%) dukungan Pemkot Jogja 5. <i>Pipeline</i> kredit/pembiayaan komersil dan korporasi 6. <i>Sales Force</i> team untuk peningkatan kredit swaguna dan purnakaraya 7. Penanganan kredit bermasalah 8. Kerjasama dengan BRI ATM H2H 9. Status <i>Update</i> Revisi RBB 2016 10. Status <i>Update Project</i> Buletin Internal Istimewa 11. Persiapan MOU Bank BPD DIY dengan KEJATI 12. Pencanaan TPKAD dan Program program pendukungnya di BPD DIY 13. Lain-lain
02 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Umum 2. Finalisasi RBB Perubahan 2016 3. Penawaran Kerjasama Pemkot Yogyakarta mengenai penyaluran dana dalam kerangka Pengendalian Inflasi Daerah 4. Finalisasi kerjasama dengan BRI 5. Peraturan OJK mengenai remunerasi pengurus Bank 6. Lain-lain
14 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda umum 2. Program kredit rakyat Yogyakarta-kerjasama dengan Pemkot Jogja 3. Perkembangan kerjasama Kesamsatan DIY 4. Peningkatan kualitas pelayanan /pembahasan hasil penilaian BSEM 2016 5. Pelaksanaan Operasional pada Libur Lebaran /Cuti bersama Lebaran 1437 H/ 2016 6. Lain-lain
15 juni 2016	Arahan Investasi Dana Pensiun PT. Bank BPD DIY
21 Juni 2016	Pembahasan Draft Struktur Organisasi
01 Juli 2016	Kinerja Juni 2016
13 Juli 2016	Menentukan pejabat pengganti Pemimpin SPI
19 Juli 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Usulan penerimaan pegawai tahun 2016 3. Penanganan NPL

28 Juli 2016	FGD <i>Road Map</i> Budaya Kerja PT. Bank BPD DIY
03 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai bantuan hukum 2. Pembahasan Calon Pemimpin Divisi Perencanaan 3. Penawaran kerjasama Digital Banking dengan Bank Mandiri
09 Agustus 2016	Menentukan rotasi dan promosi jabatan
16 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Officer Development Program 2. Kerjasama <i>Digital Banking</i> Bank Mandiri 3. Persiapan Agen laku pandai di desa mertelu gedang sari 4. Sosialisasi Transforasi BPDSI oleh OJK Pusat dan Kemendagri 5. Persiapan Rapat Kerja pemegang saham
18 Agustus 2016	Perubahan nama Paguyuban Wanita Bank BPD DIY
06 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progress kredit sindikasi semen BIMA 2. Tindak lanjut surat Dewan Komisaris No. 036/DK/IX/2016 3. Partisipasi Jogja International Batik
21 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut atas surat/saran Dekom 2. Pengendalian /Penyelesaian NPL (Optimis, Konservatif, Pesimis) 3. Penyusunan RBB 2017 4. Evaluasi dan Realisasi Corporate Plan 2010-2015 5. Progress Pengkajian Komprehensif atas pembukaan cabang baru di Kabupaten Sleman 6. Program Implementasi NSICCS PT. Bank BPD DIY 7. Progress Mobile Banking dan Laku Pandai
27 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Komite Kredit Menindaklanjuti arahan OJK 2. Pembahasan Draft KUD 2017 untuk penyesuaian RB 20017 3. Lain Lain
28 September 2016	Pembahasan Debitur a/n PT. International Estates
04 Oktober 2016	<i>Progress update</i> pelaksanaan acara HUT ke 55 BPD DIY yang dikaitkan dengan <i>Launching Samsat Online, Mobile Banking</i> , dan Majalah Istimewa
05 Oktober 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. ODP 2. AO 3. <i>Performance Management System</i>
19 Oktober 2016	<i>Kick of Meeting</i> KAP
25 Oktober 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Laporan Keuangan 2. Presentasi dari TIM PPBM 3. Rencana <i>road show</i>, pertemuan <i>road show</i>, pertemuan Direksi dan seluruh kantor cabang untuk koordinasi pencapaian target kinerja 2016 dan peningkatan kualitas penerapan <i>performance management system</i>Finalisasi RBB 2017 untuk dipaparkan kepada Dewan Komisaris 4. Inisiatif <i>Jogja Smart City / Jogja Pass Card</i>

	5. Tindak Lanjut hasil rapat koordinasi Dekom dan Dirpem
30 November 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Umum 2. <i>Progress Update : e-Samsat, Mobile Banking, Aplikasi kredit On Line dan Android</i> 3. Progress penanganan kredit bermasalah 4. Acara peringatan HUT ke 55
20 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses tutup buku 2016 2. <i>Update Progress launching dan promosi BPD DIY Mobile , BPD DIY KU, Majalah Isimewa, e-Samsat</i>

Pelatihan Direksi

Selama tahun 2016, Direksi telah mengikuti sejumlah pelatihan. Adapun pelatihan yang telah diikuti Direksi adalah sebagai berikut:

No	Anggota Direksi	Jenis Pelatihan
1	Drs. Bambang Setiawan, Akt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop Corporate Plan PT Bank BPD DIY & Outlook Perekonomian Indonesia 2016-2020</i> 2. <i>Training "Values Based Leadership"</i> 3. Sosialisasi Layanan ATM Bersama 4. Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Pekanbaru Riau 5. <i>High Level Seminar & Workshop Transformasi BPD</i> 6. <i>Indonesia Human Capital & Leadership Summit 2016</i> 7. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 8. Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak 9. Seminar Internasional "Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah" 10. Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Surabaya 11. Seminar <i>Challenges to Global Economy</i> 12. <i>International Financial Inclusion Conference "Cultivating Savings To Promote Financial Inclusion"</i> 13. Seminar Internasional Keuangan Berkelanjutan 2016
2	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop Program Sindikasi</i> 2. <i>Workshop Corporate Plan PT. Bank BPD DIY & Outlook Perekonomian Indonesia 2016-2020</i> 3. Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN-MUI 4. <i>Training "Values Based Leadership"</i> 5. <i>Workshop Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) KUR</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Workshop</i> Pembiayaan Infrastruktur 7. Seminar <i>Market Ourlook</i> dan Strategi Likuiditas 8. <i>Focus Group Discussion</i> 9. Seminar Pertukin dan Turnamen Golf BMPD Jateng dan DIY 10. Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Surabaya 11. Seminar Nasional & Infobank <i>Sharia Finance Award</i> 2016 12. Undangan Sosialisasi Pengembangan Layanan Telkom Pay dan Review Performansi Layanan <i>Multibiller Finnet</i> 13. Seminar Berkelanjutan dan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) Industri Kelapa Sawit
3	Drs. Santoso Rohmad, M.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop Corporate Plan</i> PT Bank BPD DIY & Outlook Perekonomian Indonesia 2016-2020 2. Training "<i>Values Based Leadership</i>" 3. Seminar/<i>Workshop</i> Diseminasi PP Nomor 2 Tahun 2016 4. Undangan ACI <i>World Congress</i> 2016 5. <i>Focus Group Discussion</i> 6. Pelatihan Pembekalaan SMR Level 5 7. Seminar Pertukin dan Turnamen Golf BMPD Jateng dan DIY 8. Sosialisasi POJK dan SEOJK 9. <i>Workshop</i> Pelaporan SID Dalam Rangka Program <i>Data Quality Control (QC)</i> SID Tahun 2016 10. Seminar "<i>Banking in The New World</i>" 11. Sosialisasi Perizinan/Persetujuan Kepesertaan Bank di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah serta Makroprudensial 12. Seminar "<i>EY Thought Leadership Financial Services</i> 2016" 13. Simposium Nasional Membangun Komitmen Perbankan bagi Ekonomi Kreatif 14. Sosialisasi Program Kerja Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2017 15. Seminar <i>Economic Ourlook</i> 2017 "<i>Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017</i>"
4	Drs. Cahya Widi, M.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop Corporate Plan</i> PT Bank BPD DIY & Outlook Perekonomian Indonesia 2016-2020 2. Pelatihan <i>Strategic Human Resources Management</i> dan Implementasi Manajemen SDM Berbasis Kompetensi 3. Training "<i>Values Based Leadership</i>" 4. Pelatihan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko 5. <i>Workshop</i> Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (POJK No. 45/POJK.03/2015) 6. <i>Indonesia Human Capital & Leadership Summit</i> 2016 7. <i>Focus Group Discussion</i> 8. Pelatihan Pembekalaan SMR Level 5 9. <i>Launching & Sosialisasi "Market Code of Conduct"</i>

10. Seminar Nasional "Kompetensi dan Kolaborasi Perbankan dan Fintech di Era Digital"
11. Workshop Internasional NSICCS
12. Forum *Indonesia Banking Human Capital Conference*
13. Seminar Tren Penggunaan dan Peluang Bisnis Uang Elektrik (*E-Money*) di Indonesia
14. *Workshop Pengembangan SDM bagi BPD*

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank BPD DIY dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui :

- Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengevaluasi system penggajian, tunjangan dan fasilitas Direksi.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang remunerasi Direksi.
- Dewan Komisaris mengusulkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Keputusan –Keputusan Direksi

Selama tahun 2016 Direksi telah mengeluarkan keputusan, berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi.

Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan yaitu :

No	Nomor SK	Tanggal	Tentang
1	0001/OM 1006	05 Januari 2016	Pencabutan SK Direksi No. 0401/KR 1006 Tanggal 21-07-2014 Tentang Asuransi Kematian dan Asuransi Recall Bagi Debitur Anggota DPRD DIY/Kota/Kabupaten Seluruh DIY
2	0004/OM 1007	21 Januari 2016	Parameter Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
3	0009/RB 1007	26 Januari 2016	Key Management Untuk Transaksi Berbasis Kartu
4	0010/KR 1006	28 Januari 2016	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0100/KR 1006 Tanggal 04 Maret 2013 Tentang Ketentuan Kredit Multi Usaha (KMU)

5	0021/OM 1006	15 Februari 2016	Perubahan Kantor Induk Kantor Kas Panjatan
6	0022/OM 1006	15 Februari 2016	Perubahan Kantor Induk dan Nama Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Kantor Kas Prawirotaman
7	0045/DJ 1006	10 Maret 2016	Suku Bunga Deposito Berjangka
8	0046/KA 1006	11 Maret 2016	Penambahan Keduapuluh Pedoman Rekening Pembukaan Versi 11.2009 Bank BPD DIY
9	0048/KA 1006	11 Maret 2016	Penambahan Keduapuluh Satu Pedoman Rekening Pembukaan Versi 11.2009 Bank BPD DIY
10	0054/KR 1006	07 Desember 2016	Perubahan Penetapan Loss Given Default (LGD) Bulan Desember 2016
11	0055/KR 1006	18 Maret 2016	Pembiayaan yang Dijamin dengan Agunan Tunai (Cash Collateral) dan Agunan Fisik
12	0065/HM 0501	29 Maret 2016	Panitia HUT PT.Bank BPD DIY ke -55
13	0068/DJ 1006	31 Maret 2016	Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0186/DJ 1006 Tanggal 24 Juni 2011 Tentang Standar Prosedur Pengoperasian ATM/Debet Bank BPD DIY
14	0072/HT 1006	04 April 2016	Pelelangan dan Penghapusbukuan Kendaraan Dinas PT. Bank BPD DIY
15	0073/HT 1006	04 April 2016	Panitia Pelelangan dan Penghapusbukuan Kendaraan Dinas PT.Bank BPD DIY
16	0074/SK 1006	06 April 2016	Pengelola Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Fasilitas Pemimpin Divisi/SPI PT.Bank BPD DIY
17	0075/SK 1006	06 April 2016	Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Fasilitas Pemimpin Divisi /SPI PT.Bank BPD DIY
18	0076/OM 1006	13 April 2016	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 0105/OM 1006 tanggal 9 Juni 2015 tentang Tim Task Force
19	0077/OM 1006	11 April 2016	Penyempurnaan Surat Keputusan Nomor 0091/OM 1006 Tanggal 20 Maret 2012 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Pengembangan Jaringan Bank BPD DIY
20	0080/DJ 1006	13 April 2016	Perubahan Kedua Surat Keputusan Direksi Nomor : 0096/DJ 1006 Tanggal 5 Juni 2015 Tentang Pedoman Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II
21	0086/DJ 1006	26 April 2016	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II - Layanan Bulk Payment
22	0087/OM 1006	26 April 2016	Penyempurnaan Surat Keputusan Nomor 0584/OM 1006 Tanggal 17 Desember 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Standar Pelayanan Bank
23	0091/DJ 1006	29 April 2016	Perubahan Ketiga Surat Keputusan Direksi Nomor : 0096/DJ 1006 Tanggal 5 Juni 2015 Tentang Pedoman Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II
24	0092/SK 1006	29 April 2016	Pengelola Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank BPD DIY
25	0093/SK 1006	29 April 2016	Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank BPD DIY
26	0097/HT 1006	09 Mei 2016	Sistem Penjualan dan Harga Dasar Penjualan Kendaraan Dinas Tahun 2016
27	0100/DJ 1006	11 Mei 2016	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 0106/DJ 1006 Tanggal 10 Juni 2015 Tentang Wewenang Pemberian Special Rate Deposito Berjangka
28	0101/KR 1006	11 Mei 2016	Ketentuan dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
29	0103/KR 1006	16 Mei 2016	Ketentuan dan Pedoman Operasional Skim Kredit Mikro
30	0104/DJ 1006	13 Mei 2016	Sistem Bank Indonesia - Electronic Trading Platform (BI-

			ETP) dan Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)
31	0106/KR 1006	19 Mei 2016	Perubahan IV atas Surat Keputusan Direksi Nomor 309/KR 1006 Tanggal 08 November 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 0068/KR 1006 Tanggal 16 Februari 2007 Tentang Pedoman Operasional Bank BPD DIY Syariah
32	0107/KR 1006	19 Mei 2016	Perubahan II Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 0576/KR 1006 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Komite Pembiayaan
33	0108/OM 1006	20 Mei 2016	Relokasi Kantor Kas Universitas Negeri Yogyakarta
34	0109/OM 1006	20 Mei 2016	Relokasi Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
35	0110/DJ 1006	20 Mei 2016	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 0105/DJ 1006 Tanggal 30 Maret 2012 Tentang Ketentuan Penyaringan Undian Gratis Berhadiah Tabungan Sutera & Sutera Emas Bank BPD DIY
36	0116/SK 1006	27 Mei 2016	Pengurus dan Pengelola Media Internal PT.Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
37	0117/SK 1006	27 Mei 2016	Pengelola Proyek Pembangunan Gedung PT.Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Pembantu Maguwoharjo
38	0118/SK 1006	27 Mei 2016	Panitia Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi Pembangunan Gedung PT.Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Pembantu Maguwoharjo
39	0121/OM 1006	02 Juni 2016	Tim Budaya Perusahaan PT.Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
40	0122/DJ 1006	07 Juni 2016	Tarif Suku Bunga / Jasa Manfaat Tabungan
41	0126/KR 1006	13 Juni 2016	Perubahan II Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 0299/KR 1006 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Formulir Perkreditan
42	0127/DJ 1006	15 Juni 2016	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 0110/DJ 1006 Tanggal 20 Mei 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 0105/DJ 1006 Tentang Ketentuan Penyaringan Undian Gratis Berhadiah Tabungan Sutera dan Sutera Emas Bank BPD DIY
43	0134/SK 1006	15 Juni 2016	Pengelola Proyek Pengadaan Perpanjangan Sewa Gedung Kantor Cabang Pembantu Maguwoharjo dan Kantor Kas Syariah Maguwoharjo
44	0135/SK 1006	15 Juni 2016	Panitia Pengadaan Perpanjangan Sewa Gedung Kantor Cabang Pembantu Maguwoharjo
45	0136/DJ 1006	15 Juni 2016	Pedoman Operasional Jasa Layanan Safe Deposit Box Bank BPD DIY
46	0144/KR 1006	21 Juni 2016	Perubahan Kebijakan Dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Bidang Pembiayaan Buku III Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Bab VIII Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
47	0146/OM 1006	24 Juni 2016	Relokasi Kantor Kas Pleret
48	0153/SK 1006	28 Juni 2016	Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Kantor PT.Bank BPD DIY
49	0155/OM 1006	29 Juni 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta
50	0156/OM 1006	30 Juni 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri - 2 PT.Bank BPD DIY Kantor Cabang Wates

51	0157/DJ 1006	30 Juni 2016	Suku Bunga/Jasa Giro Kas Umum Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran, Swasta dan Antar Bank
52	0158/KP 1006	01 Juli 2016	Tim Counterpart Pengukuran Analisis Beban Kerja Sebagai Dasar Perencanaan SDM PT.Bank BPD DIY
53	0159/KR 1006	01 Juli 2016	Penambahan Bab X Kebijakan Margin dan Bagi Hasil Counter Pembiayaan Dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Bidang Pembiayaan Buku I Kebijakan Pembiayaan
54	0160/KR 1006	01 Juli 2016	Penambahan Bab XI Kebijakan Ganti Rugi (Ta widh) dan Sanksi Pembiayaan (Ta zir) dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Bidang Pembiayaan Buku I Kebijakan Pembiayaan
55	0162/DJ 1006	01 Juli 2016	Pengelolaan Cadangan Likuiditas Bank
56	0163/DJ 1006	01 Juli 2016	Perubahan Pertama SK Direksi Nomor 0035/DJ 1006 Tentang Penempatan Dana Dalam Bentuk Surat Berharga
57	0165/KP 1006	01 Juli 2016	Penerimaan Pegawai Untuk Memenuhi Kebutuhan Khusus
58	0166/OM 1006	14 Juli 2016	Relokasi Kantor Cabang Pembantu Imogiri
59	0167/OM 1006	14 Juli 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Imogiri
60	0180/DJ 1006	19 Juli 2016	Dealer Pasar Uang dan Pasar Modal
61	0181/SK 1006	21 Juli 2016	Pembentukan Tim Penyusun / Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Kearsipan PT BPD DIY
62	0183/KP 1006	25 Juli 2016	Pedoman Pengukuran Budaya Kerja
63	0184/DJ 1006	26 Juli 2016	Suku Bunga Deposito Berjangka
64	0188/PW 1006	29 Juli 2016	Pedoman Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
65	0191/DJ 1006	05 Agustus 2016	Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi Nomor : 0389/DJ 1006 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank BPD DIY
66	0202/DJ 1006	12 Agustus 2016	Ketentuan Wewenang Pemberian Suku Bunga Khusus (Special Rate) Deposito Berjangka
67	0203/KR 1006	15 Agustus 2016	Tim Crash Program Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
68	0204/OM 1006	16 Agustus 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Srandakan
69	0208/OM 1006	24 Agustus 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Jogja City Mall Yogyakarta
70	0209/HM 0501	24 Agustus 2016	Panitia HUT PT.Bank BPD DIY Ke-55
71	0211/DJ 1006	25 Agustus 2016	Suku Bunga Deposito Berjangka Untuk Pemerintah Daerah
72	0212/KR 1006	26 Agustus 2016	Pembiayaan Swaguna Syariah
73	0213/KR 1006	26 Agustus 2016	Pembiayaan Purnakarya Syariah
74	0215/HT 1006	30 Agustus 2016	Pelelangan dan Penghapusanbuku Kendaraan Dinas PT.Bank BPD DIY
75	0216/HT 1006	30 Agustus 2016	Panitia Pelelangan dan Penghapusbuku Barang Bergerak (Inventaris Kantor) PT.Bank BPD DIY
76	0219/KR 1006	02 September 2016	Pembiayaan Dengan Akad Qardh (Rahn/ Gadaai Emas Syariah)
77	0220/DJ 1006	08 September 2016	Jasa Layanan Pembayaran BPJS Kesehatan
78	0222/KR 1006	08 September 2016	Pedoman Pengelolaan Pemberiaan Kredit kepada UMKM
79	0232/OM 1006	16 September 2016	Peningkatan Status Payment Point Komplek 2

			Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menjadi Kantor Kas
80	0233/KR 1006	20 September 2016	Pengelolaan Kredit yang Digunakan untuk Membiayai Belanja Modal Pemerintah
81	0237/KR 1006	27 September 2016	Komite Kredit
82	0239/KR 1006	28 September 2016	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0197/KR 1006 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Kredit SUP-005
83	0240/OM 1006	28 September 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Kantor Kas Gabusan
84	0241/OM 1006	29 September 2016	Pembukaan Payment Point Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman
85	0242/OM 1006	29 September 2016	Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT.Bank BPD DIY Tahun 2017
86	0246/HT 1006	04 Oktober 2016	Sistem Penjualan dan Harga Dasar Penjualan Kendaraan Dinas Tahun 2016
87	0247/OM 1006	07 Oktober 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Kantor Kas Sewon
88	0250/SK 1006	24 Oktober 2016	Pengelola Proyek Pengadaan Kalender PT.Bank BPD DIY Tahun 2017
89	0251/SK 1006	24 Oktober 2016	Panitia Pengadaan Kalender PT.Bank BPD DIY Tahun 2017
90	0252/OM 1006	25 Oktober 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY SPBU Duwet Wonosari
91	0253/OM 1006	26 Oktober 2016	Peningkatan Status Kantor Kas Pleret Menjadi Kantor Cabang Pembantu
92	0254/DJ 0500	26 Oktober 2016	Penempatan Modal Kerja pada Unit Usaha Syariah
93	0255/KR 1006	26 Oktober 2016	Komite Pembiayaan
94	0263/DJ 1006	03 November 2016	Tabungan Sutera Istimewa
95	0265/KA 1006	09 November 2016	Penambahan Keduapuluh Dua Pedoman Rekening Pembukaan Versi 11.2009 Bank BPD DIY
96	0268/KR 1006	11 November 2016	Kredit Kepada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)
97	0281/OM 1006	14 Desember 2016	Pembukaan Anjungan Tunai Mandiri PT.Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Pleret
98	0285/KP 1006	21 Desember 2016	Fasilitas Kendaraan Dinas dan Telepon Seluler/Handphone bagi Pemimpin Divisi/SPI/UUS/Desk dan Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Syariah
99	0287/OM 1006	22 Desember 2016	Pedoman Tutup Tahun Buku Bank BPD DIY Versi.2016
100	0288/SK 1006	22 Desember 2016	Penomoran Buku Tabungan Simpeda iB
101	0289/KA 1006	22 Desember 2016	Penyempurnaan Rekening Sub Buku Besar (SBB) dan Sub-Sub Buku Besar (SSBB)
102	0290/KR 1006	23 Desember 2016	Aplikasi Bank BPD DIY Kawan Usaha (BPD DIY KU)
103	0300/OM 1006	29 Desember 2016	Peningkatan Status Kantor Kas Prambanan Menjadi Kantor Cabang Pembantu
104	0302/OM 1006	29 Desember 2016	Peningkatan Status Kantor Kas Syariah Kusumanegara Menjadi Kantor Cabang Pembantu Syariah

Surat Edaran Direksi yang dikeluarkan yaitu :

No	Nomor SE	Tanggal	Tentang
1	0001/KR 1006	05 Januari 2016	Kredit Swaguna Kepada Anggota DPRD DIY/Kota/Kabupaten Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta
2	0002/KP 1007	08 Januari 2016	Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016

3	0003/KR 1006	22 Januari 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Triwulan I Tahun 2016
4	0004/KR 1006	22 Januari 2016	Penetapan Loss Given Default (LGD)
5	0005/KR 1006	22 Januari 2016	Pembiayaan Kepada Anggota DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
6	0006/KR 1006	27 Januari 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan I Tahun 2016
7	0007/KR 1006	28 Januari 2016	Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor : 0059/KR 1006 Tanggal 18 September 2015 Perihal Kredit Swaguna
8	0008/KR 1006	28 Januari 2016	Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor : 0037/KR 1006 Tanggal 12 April 2013 Perihal Kredit Purnakarya
9	0009/KR 1006	28 Januari 2016	Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor: 0069/KR 1006 Tanggal 26 Agustus 2011 Perihal Kredit Swaguna Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
10	0010/DJ 1006	30 Januari 2016	Fitur/Jasa Layanan Pembayaran (Payment) Tagihan dan Pembelian Voucher Isi Ulang dari Telkomsel dan Indosat melalui Channel ATM, Teller dan Autodebet
11	0011/DJ 0607	04 Maret 2016	Perubahan Surat Edaran Nomor 0061/DJ 0607 tanggal 02 Oktober 2015 Perihal Denominasi Token Prepaid PLN, Biaya Administrasi dan Fee Jasa Layanan Pembayaran Listrik PLN PT. Bank BPD DIY
12	0012/DJ 1006	08 Maret 2016	Kewenangan Menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Kurs Valuta Asing (SIKVA)
13	0013/KR 1006	28 Maret 2016	Ketentuan Pelaksanaan KPR Sejahtera
14	0014/KR 1006	13 April 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Triwulan II Tahun 2016
15	0015/KR 1006	20 April 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan II Tahun 2016
16	0016/KR 1006	22 April 2016	Cost Overrun
17	0017/DJ 1006	26 April 2016	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II - Layanan Bulk Payment
18	0018/KR 1006	11 Mei 2016	Suku Bunga Kredit Komersial
19	0019/KR 1006	16 Mei 2016	Suku Bunga, Provisi, Denda, Biaya Administrasi, dan Biaya Lainnya Skim Kredit Mikro
20	0020/KR 1006	20 Mei 2016	Paket Promo 55 Tahun Bank BPD DIY untuk Kredit Swaguna dan Purnakarya
21	0021/KR 1006	09 Juni 2016	Ketentuan Khusus Pembiayaan dengan Akad Qardh (Rahn/Gadai Emas Syariah) Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H, Hari Raya Idul Fitri 1437 H dan Tahun Ajaran Baru 2016/2017
22	0022/KR 1006	10 Juni 2016	Kredit Purnakarya
23	0023/DJ 1006	13 Juni 2016	Penggunaan Safe Deposit Box (SDB) untuk Kepentingan Bank
24	0024/KP 1006	29 Juni 2016	Kegiatan Operasional Bank Dalam Rangka Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri Tahun 2016
25	0025/KP 1006	29 Juni 2016	Insentif Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1437 H
26	0026/DJ 1006	30 Juni 2016	Perubahan Biaya Layanan Interkoneksi ATM Malaysia Electronic Payment System (MEPS)
27	0028/DJ 1006	01 Juli 2016	Perubahan Perhitungan Bunga Antar Kantor atau Fund Transfer Price (FTP)
28	0029/KR 1006	20 Juli 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Triwulan III Tahun 2016
29	0030/KR 1006	25 Juli 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan III Tahun 2016

30	0031/DJ 1006	27 Juli 2016	Dual - Control Proses Pencetakan/Personalisasi Ulang Kartu ATM/Debit Bank BPD DIY
31	0032/KR 1006	29 Juli 2016	Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor 0020/KR 1006 Tanggal 20 Mei 2016 Tentang "Paket Promo 55 Tahun Bank BPD DIY" Untuk Kredit Swaguna dan Purnakarya
32	0033/DJ 1006	29 Juli 2016	Perubahan Surat Edaran Direksi Nomor 0049/DJ 1006 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Standar Prosedur Pengoperasian (SPP) Jasa Layanan Pembayaran (Payment) XL Bank BPD DIY
33	0035/DJ 1006	05 Agustus 2016	Daftar User ID dan Kewenangan pada Aplikasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II
34	0036/DJ 1006	05 Agustus 2016	Kewenangan Pada Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP
35	0037/DJ 1006	29 Agustus 2016	Daftar User ID dan Kewenangan Pada Aplikasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II
36	0038/DJ 1006	29 September 2016	Kewenangan Pada Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP
37	0039/KP 1006	01 September 2016	Pakaian Dinas Tahun 2016
38	0040/KR 1006	09 September 2016	Ketentuan Pembukaan Data Kredit dan Penatausahaan Dokumen Kredit pada Menu Core Banking System (CBS)
39	0041/DJ 1006	09 September 2016	Standar Prosedur Pengoperasian (SPP) Jasa Layanan Pembayaran (Payment) BPJS Kesehatan Bank BPD DIY
40	0042/DJ 1006	15 September 2016	Penatausahaan Buku Tabungan
41	0043/DJ 1006	20 September 2016	Perubahan Lampiran SK Direksi No.0184/DJ 1006 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Suku Bunga Deposito Berjangka
42	0044/DJ 1006	21 September 2016	Penatausahaan Rekaman Suara Transaksi Pasar Uang dan Pasar Modal
43	0045/KR 1006	07 Oktober 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Triwulan IV Tahun 2016
44	0046/KR 1006	24 Oktober 2016	Nilai Exposure At Default (EAD) Untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan IV Tahun 2016
45	0047/KP 1006	03 November 2016	Seleksi Calon Pegawai Kontrak Officer
46	0048/DJ 1006	03 November 2016	Suku Bunga Tabungan Sutera Istimewa
47	0049/DJ 1006	03 November 2016	Program Hadiah Langsung Tabungan Sutera Istimewa Periode I Tahun 2016
48	0050/DJ 1006	03 November 2016	Pedoman Operasional Tabungan Sutera Istimewa
49	0051/KR 1006	11 November 2016	Kredit Kepada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)
50	0053/KR 1006	07 Desember 2016	Perubahan Nilai Exposure At Default (EAD) untuk Perhitungan CKPN Bulan Desember 2016
51	0056/DJ 1006	22 Desember 2016	Kewenangan Pemberian Suku Bunga Spesial Deposit Berjangka Akhir Tahun 2016
52	0057/KP 1007	28 Desember 2016	Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017
53	0059/KP 1006	29 Desember 2016	Pelaksanaan Operasional Bank PAda Akhir Tahun 2016 dan Uang Lembur Dalam Rangka Operasional Bank Akhir Tahun 2016
54	0061/KR 1006	30 Desember 2016	Ketentuan Pelaksanaan KPR Sejahtera
55	0063/KR 1006	30 Desember 2016	Suku Bunga Kredit - SUP 005
56	0282/DJ 1006	14 Desember 2016	Perubahan Pertama SE Direksi No.0049/DJ 1006 Tanggal 03 November 2016 Tentang Program Hadiah Langsung Tabungan Sutera Istimewa Periode I Tahun 2016

KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Profil anggota komite-komite Dewan Komisaris

1. Prof. Ainun Na'im, Ph.D (Dewan Komisaris)
2. Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A (Dewan Komisaris)
3. Drs. Bambang Wisnu Handoyo (Dewan Komisaris)
4. Eko Suwardi, Dr., M.Sc., Ak., CA.

Pendidikan : S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, S2 Master of Science, California State University, Fresno, USA, S3 Doctor of Philosophy, Queensland University of Technology, Australia

Pendidikan non formal dan lokakarya yang pernah diikuti:

1. *Participant, The 2015 IIA Indonesia National Conference Heritage of Cultures: Profession that Brings Value, The Institute of Internal Auditors Indonesia.*
2. *Participant in the ACCA Train the Trainer of papers F5 (Performance Management), F7 (Financial Reporting) and F8 (Audit and Assurance), ACCA Indonesia*
3. *Participant, IAI-IFAC International Seminar "The Relevance of Profesional Accountants in Hyper Connected World", IAI-IFAC*

Jabatan saat ini:

1. Dosen FEB UGM
 2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi
 3. Instructor, Management Development Program PT Bank Sinarmas Tbk Batch 49, P2EB FEB UGM in collaboration with PT Bank Sinarmas Tbk
-
5. Mamduh M. Hanafi, Dr., M.B.A.

Pendidikan : S1 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, S2 Master of Business Administration, Temple University, S3 Doctor of Philosophy, University of Rhode Island

Pendidikan non formal dan lokakarya yang pernah diikuti:

1. *Participant, The 2015 IIA Indonesia National Conference Heritage of Cultures: Profession that Brings Value, The Institute of Internal Auditors Indonesia*
2. *Instructor, Certified Financial Planner Training, Public Class, Yogyakarta Batch I, Master of Management Program, Faculty of Economics and Business UGM*

Jabatan saat ini:

1. Dosen UGM
2. *VP Membership and Administrative Affairs, Asosiasi Finansial Indonesia (Indonesian Financial Association)*
3. *Instructor, Management Development Program PT Bank Sinarmas Tbk Batch 49, P2EB FEB UGM in collaboration with PT Bank Sinarmas Tbk*

Komite Audit

Jumlah dan Komposisi

Pada tahun 2016 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit. Komite Audit PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen.

Jumlah dan komposisi Komite Audit PT. Bank BPD DIY selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Ketua/Dewan Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	Anggota/Pihak Independen
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen

Keahlian dan Independensi

1. Komite Audit terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Ekonomi.
3. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan di bidang audit intern.
2. Menelaah dan mengevaluasi Laporan Keuangan Publikasi.
3. Menelaah laporan hasil audit intern maupun ekstern serta memantau tindak lanjutnya.
4. Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Membuat pedoman kerja Komite.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2016 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	5	4	80%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	5	2	40%
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	5	5	100%
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	5	5	100%

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja dan realisasi Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mereview Program Kerja Audit Tahunan	Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2017 yang dibuat oleh SPI dilakukan review oleh Komite Audit
2	Membahas hasil audit intern/ekstern	Pembahasan Laporan Hasil Audit: a. Kantor Akuntan Publik b. OJK c. Lainnya
3	Pertemuan dengan SPI	Penjelasan Aspek-aspek Audit dan hubungan Komite Audit dengan Satuan Pengawas Intern.
4	Membahas temuan-temuan SPI	Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA): a. Semester II tahun 2015 b. Semester I tahun 2016

5	Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Tahunan Bank BPD DIY Tahun 2016
6	Melakukan review Pedoman Audit/Audit Charter	Pembahasan Pedoman Audit/Audit Charter
7	Melakukan review laporan publikasi	Review Laporan Publikasi Triwulanan bank
8	Melakukan rapat komite	Melakukan rapat komite sebanyak 5 kali dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan pokok-pokok Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Semester II 2015. b. Pembahasan hasil usaha Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & tanzil atas Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY yang berakhir 31 Desember 2015. c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY yang berakhir 31 Desember 2016. d. Pembahasan hasil usaha Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & tanzil atas Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY yang berakhir 31 Desember 2016. e. Pembahasan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & tanzil atas Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY posisi 30 September 2016.

Komite Pemantau Risiko

Jumlah dan Komposisi

Pada tahun 2016 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantauan Risiko. Komite Pemantauan Risiko PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen.

Jumlah dan komposisi Komite Pemantauan Risiko PT. Bank BPD DIY selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Ainun Naim, Ph. D	Ketua/Dewan Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	Anggota/Pihak Independen
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen

Keahlian dan Independensi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Ekonomi dan Keuangan:

1. Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.
2. Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Aktif.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, meliputi 8 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.
 - d. Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut dalam rangka perbaikan kepada Direksi.

4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko (*risk culture*).
6. Membuat pedoman kerja Komite.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2016 Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Naim, Ph. D	5	5	100%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	5	3	60%
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	5	5	100%
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	5	5	100%

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantauan Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mereview Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Rapat Koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
2	Pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko	Telah dilaksanakan pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
3	Menelaah laporan profil risiko dan laporan peran Direktur Kepatuhan	Pencermatan atas laporan profil risiko oleh bank serta Laporan Peran Direktur Kepatuhan
4	Melakukan Rapat Komite	Melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali: <ol style="list-style-type: none"> a. Review Laporan Tingkat Kesehatan posisi

- Desember 2015
- b. Review Laporan *Good Corporate Governance* posisi 31 Desember 2015
- c. Review Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2015.
- d. Review Laporan Profil Risiko Triwulan I 2016
- e. Review Laporan tingkas Kesehatan bank Semester I Tahun 2016

Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah dan Komposisi

Pada tahun 2015 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pejabat Eksekutif.

Jumlah dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Ketua/Dewan Komisaris Independen
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Anggota /Dewan Komisaris Independen
Gamal Kristiyanto, SH. MM	Anggota/Pejabat Eksekutif

Keahlian dan Independensi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi.
2. Anggota Komite yang berasal dari PT. Bank BPD DIY adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum yang memahami ketentuan-ketentuan remunerasi dan nominasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi

1. Membuat pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kinerja individual.
 - c. Kewajaran dengan peer group.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	4	4	100,00
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	4	4	100,00
Gamal Kristiyanto, SH. MM	4	4	100,00

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Menelaah dan mereview kebijakan remunerasi Bank	Hasil pembahasan kebijakan remunerasi untuk disampaikan dalam RUPS tahun 2017
2	Menyusun kebijakan nominasi Bank	Masih dalam proses
3	Melaksanakan rapat komite	Rapat diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan atas Pemberian Penghargaan kepada Direksi. b. Perumusan aspek Remunerasi Pengurus c. Tindak lanjut rumusan remunerasi untuk disampaikan dalam RUPS

Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan fungsi Sekretaris Bank BPD DIY dilaksanakan oleh Divisi SDM dan Umum.

Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki kedudukan independen dalam tugasnya yang mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meminimalkan risiko kepatuhan

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap:

- a. Keputusan melalui Rapat Komite
- b. Keputusan tanpa melalui Rapat Komite
- c. Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan operasional Bank konvensional maupun syariah
- d. Tugas Satuan Pengawas Intern
- e. Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan regulator
- f. Kepatuhan pelaporan kepada regulator

Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian, adalah sebagai berikut:

Items	Status	Keterangan
CAR	Memenuhi ketentuan	CAR pada posisi 31 Desember 2016, sebesar 21,98 % melebihi persyaratan yang ditentukan OJK.
GWM	Memenuhi ketentuan	Posisi 31 Desember 2016, GWM Primer dan LDR sebesar 6,67%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
NPL	Memenuhi ketentuan	NPL Gross per 31 Desember 2016 adalah sebesar 3,40 %, dan NPL Neto sebesar 2,47% lebih rendah dibandingkan ketentuan yaitu NPL maksimum 5%.
PDN	Memenuhi ketentuan	PDN per 31 Desember 2016 sebesar 0%, dibandingkan dengan peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas.
BMPK	Memenuhi ketentuan	BMPK pada posisi 31 Desember 2016 sebesar 2,46%, lebih rendah daripada persyaratan BMPK pada ketentuan yaitu sebesar 10%.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Memenuhi ketentuan	PT. Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT.
--	--------------------	---

Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi mengakibatkan bank menjadi rentan atas risiko dimanfaatkan dalam usaha pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu dengan menetapkan dalam suatu buku pedoman bagi perusahaan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Dalam menjalankan program tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Unit ini bertanggung jawab selain mengkoordinasikan penerapan tindak pidana pencucian uang serta program prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan sebutan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Sebagai upaya untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Fungsi Kepatuhan senantiasa melakukan *monitoring* transaksi nasabah. Dari hasil *monitoring* nasabah tersebut diperoleh laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pencegahan tersebut menjadi upaya Bank dalam menghadapi berbagai risiko terutama risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional.

Dalam rangka penerapan program APU & PPT, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Manajemen dalam kebijakan pengorganisasian
- b. Kebijakan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)
- c. Pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*)
- d. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi

- e. Penetapan kriteria dan prosedur area berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP)
- f. Prosedur transfer dana
- g. Pemantauan dan pengkinian data nasabah
- h. Sistem Informasi dan Pelaporan
- i. *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR)
- j. Sanksi atas pelanggaran ketentuan APU & PPT dan ketentuan perundang-undangan
- k. Pelatihan pegawai dan penatausahaan dokumen

Pada tahun 2016, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan berkaitan dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Pelatihan	Jumlah Peserta	Instruktur
1.	06 Februari 2016	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT	51	Kepala Grup Kepatuhan BCA
2.	12 & 14 Maret 2016	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT	54 & 35	Kepala Grup Kepatuhan BCA
3.	06-07 April 2016	Pelatihan “Peran Bank dalam mencegah kejahatan perbankan melalui pengawasan internal terpadu”	6	FKDKP
4.	09 & 16 April 2016	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT	102 & 104	Kepala Grup Kepatuhan BCA
5.	14 & 28 Mei 2016	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT	63 & 80	Kepala Grup Kepatuhan BCA
6.	24-25 Agustus 2016	Pelatihan “Peran Bank dalam mencegah kejahatan perbankan melalui pengawasan internal terpadu”	23	FKDKP

Fungsi Audit Intern

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, PT. Bank BPD DIY telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Kontrol Intern Cabang (KIC) yang masing-masing independen terhadap satuan kerja operasional. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sedangkan KIC bertanggung jawab langsung kepada SPI. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor

0307/OM 1006 tanggal 30 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Pengawasan Intern (SPI) berubah penamaan menjadi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Sepanjang tahun 2016, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat melalui audit berbasis risiko. Sehingga, PT. Bank BPD DIY dapat memitigasi risiko yang akan terjadi dan nasabah akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank.

Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap:

- a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern.
- b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern.
- c. Penilaian kualitas kinerja.

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil audit.

Fungsi SKAI dan KIC

Fungsi SKAI meliputi:

1. Sebagai *Evaluator* Sistem Pengendalian Intern, yaitu membantu manajemen dalam memastikan bahwa Bank secara berkesinambungan mampu:
 - a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
 - b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
 - c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan.
 - d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
 - e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
 - f. Mengamankan dana yang dihimpun Bank dari masyarakat.
 - g. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.

2. Sebagai Katalisator, internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan jasa perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam peran ini, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*.
3. Sebagai Konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan terutama yang menyangkut sistem pengendalian.

Fungsi KIC, antara lain adalah:

1. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan prosedur operasional perbankan di kantor cabang.
2. Melakukan pengawasan proses kegiatan usaha kantor cabang.
3. Melakukan koordinasi penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang.
4. Melakukan koordinasi perbaikan/penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang.
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal.

PT. Bank BPD DIY telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan:

- a. Menyusun *Internal Audit Charter*.
- b. Membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan tata kerja.

Kinerja SKAI pada tahun 2016

- a. Audit Intern, meliputi:

No	LHA Nomor	Tanggal	Nama Obyek/Auditee	Jenis Audit
1	0015/PW 0001	26 Januari 2016	Kantor Pusat	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2015
2	0016/PW 0001	26 Januari 2016	Seluruh Cabang	Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3	0012/PW 0000	26 Januari 2016	Kantor Pusat dan Cabang Syariah	SKNBI Konvensional & Syariah
4	0013/PW 0000	26 Januari 2016	Kantor Pusat dan Cabang Syariah	BI RTGS Konvensional dan Syariah
5	0075/PW 0000	11 Mei 2016	Kantor Pusat dan Cabang Syariah	Audit Security Sistem BI - ETP
6	0052/PW 0001	1 April 2016	Cabang Wonosari	Audit Khusus Lanjutan Kredit Mikro Cabang Wonosari
7	0049/PW 0000	31 Maret 2016	Seluruh Cabang	Audit Khusus Atas Kredit Mikro PT. Bank BPD DIY

8	0087/PW 0001	03 Juni 2016	Cabang Wonosari	Audit Khusus Perkreditan Nasabah
9	120/PW 0000	15 Juli 2016	Seluruh Cabang	Operasional Seluruh Cabang I
10	0142/PW 0000	02 Agustus 2016	Divisi Teknologi Informasi	Teknologi Informasi
11	0144/PW 0000	03 Agustus 2016	Divisi Trisuri	Operasional ATM
12	0143/PW 0000	03 Agustus 2016	Divisi Prekreditan	Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Mikro
13	0152/PW 0001	18 Agustus 2016	Divisi MR &K	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
14	0179/ PW 001	07 Oktober 2016	Kantor Pusat	Operasional Kantor Pusat
15	0237/PW 001	28 Desember 2016	Seluruh Cabang	Operasional Seluruh Cabang II

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai

Sebagai upaya peningkatan kompetensi para auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDM dan Umum, dalam tahun 2016 seluruh auditor telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan serta beberapa seminar. Adapun auditor SKAI yang telah melakukan sertifikasi auditor internal sebanyak 13 orang. Berikut pelatihan dan seminar yang diikuti auditor selama tahun 2016

NO	TANGGAL	NAMA DIKLAT & SEMINAR	TEMPAT PELATIHAN
1	23 Januari 2016	Program Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Perbankan	
2	30 Januari 2016	Pelatihan <i>Effective Corporate Communication Strategy</i>	Kantor Pusat PT. BANK BPD DIY
3	06 Februari 2016	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
4	10-11 Februari 2016	<i>Workshop Corporate Plan</i> PT Bank BPD DIY & Outlook	Kaylana Resort Yogyakarta
5	17-18 Februari 2016	Pelatihan Profil Risiko Cabang Konvensional	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
6	18 Februari 2016	Evaluasi Kredit Mikro	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
7	03 Maret 2016	BARa BI <i>Monthly Sharing Session</i>	Gedung BRI Jakarta

8	03 Maret 2016	Seminar Nasional "Pengembangan SDM Akuntansi Forensik di Indonesia"	Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta
9	10-11 Maret 2016	Pelatihan Penguatan Tiga Pilar Pengendalian (<i>The Three Lines of Defense</i>) dalam Rangka Mitigasi Risiko terjadinya	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
10	11-13 Maret 2016	Training " <i>Values Based Leadership</i> "	Highland Park Resort, Sukajadi, Bogor
11	12 & 14 Maret 2016	Pelatihan, Refreshment dan <i>Workshop</i> Penerapan Program APU-PPT	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
12	14-15 Maret 2016	Technical Workshop Identifikasi Risiko Kredit & Pengendalian Kredit Bermasalah	Hotel Swiss Bell Kemang, Jakarta
13	29-30 Maret 2016	<i>Workshop</i> APU-PPT Bidang Kredit	Hotel Atlet Century Jakarta Selatan
14	11-20 April 2016	Program Diklat Internal Auditor Korporasi " Komunikasi & Psikologi Audit"	PPA & K Puncak, Jawa Barat
15	27 April 2016	Pelatihan Teknik Perhitungan CKPN Sesuai PSAK 50/55 Revisi 2014 & PAPI 2008	Hotel H Boutique Yogyakarta
16	12 Mei 2016	Pelatihan Ketentuan Skim Kredit Mikro dan KUR	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
17	14 Mei 2016	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT kepada Pegawai <i>Front Office</i> Bank	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
18	16 Mei 2016	Pelatihan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
19	17-19 Mei 2016	Pelatihan Standar Pelayanan Bank bagi <i>Frontliner</i> (Satpam) & <i>Back Office</i>	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta
20	19-22 Mei 2016	Pelatihan <i>Try Out-Ujian</i> Sertifikasi Cluster I CFrA	Hotel Bukit Indah Puncak, Jawa Barat
21	26 Mei 2016	Seminar Legal Banking Awareness	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
22	01-03 Agustus 2016	Pelatihan Peningkatan Pemahaman tentang Treasury/Aktivitas Treasury, ALMA/ALCO serta Permasalahannya yang terjadi dalam Implementasinya	Hotel Santika Premiere Jakarta

23	11 Agustus 2016	Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Kebakaran	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
24	24-25 Agustus 2016	Pelatihan Pencegahan Kejahatan Perbankan melalui Pengawasan Internal Terpadu	The Alana Hotel, Mataram City Yogyakarta
25	26-27 Agustus 2016	Pelatihan Pembekalan SMR Level 2	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta
26	30-31 Agustus 2016	<i>Workshop Investigative Interview Skill</i>	Hotel Santika Dyandra Medan
27	2 Sept - 29 Okt 2016	Diklat Sekolah Staf & SESPIBANK	Kampus Bumi LPPI Jakarta Selatan
28	05-07 September 2016	Workshop " <i>Digital Forensic</i> "	Hotel Santika TMII Jakarta
29	07-09 September 2016	<i>3 Days Workshop Asses Recovery Management</i>	Hotel Intercontinental MidPlaza Jakarta
30	15 September 2016	Seminar Program Transformasi BPD	Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta
31	19 - 22 September 2016	In House Training Aspek Hukum Perkreditan	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
32	26 September 2016	Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Baru	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
33	26 September 2016	Pelatihan Perpajakan Brevet A & B	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
34	29 September 2016	Pelatihan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> untuk <i>Back Office</i>	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
35	17-27 Oktober 2016	Pelatihan Dasar-Dasar Audit	Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA & K)
36	03-05 November 2016	Pembekalan & Ujian Sertifikasi MR level 2	Pakubuwono Terrace / STIA LAN
37	09-11 November 2016	Pelatihan <i>Internal Audit of Islamic Bank</i>	Kampus LPPI Jakarta Selatan

38	15 November 2016	<i>Coaching Clinic</i> untuk Pemantauan Kepatuhan Peserta SPBI dan Peserta Sistem BI-ETP serta KPDHN Tahun 2017	Hotel Borobudur Jakarta
39	15-16 November 2016	Pelatihan Penguatan Tiga Pilar Pengendalian (<i>The Three Lines of Defense</i>) dalam Rangka Mitigasi Risiko terjadinya Kesalahan Berulang	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
40	17-18 November 2016	Konferensi Nasional I FKSPI 2016	Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta
41	02-04 Desember 2016	<i>Workshop on Audit Forensic</i>	Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta
42	02-07 Desember 2016	Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan tentang Pemantauan Kepatuhan dan Mitigasi Risiko dalam Komite Kredit/Komite Pembiayaan	Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
43	09-10 Desember 2016	<i>In House Training</i> Pemberian Kredit kepada Perusahaan Pembiayaan (<i>Multifinance</i>)	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta

c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SKAI:

1. Sebagai *counterpart* auditor ekstern
2. Berperan sebagai mitra/mediator berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Bank
3. Pembinaan kepada *auditee* yang berkaitan dengan materi hasil audit
4. Mengadakan koordinasi dengan Tim Pembina BUKP Propinsi DIY

d. Laporan yang disusun pada tahun 2016, adalah:

1. Laporan Kinerja Satuan Pengawasan Intern Tahun 2016
2. Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester I dan II Tahun 2016 yang disampaikan kepada OJK setiap semester dan juga kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Anti-Fraud yang disampaikan kepada OJK setiap semester.
4. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) SKNBI, LHPK BI-RTGS, LHPK BI-SSSS, LHPK BI-ETP, dan LHPK DHN baik konvensional maupun syariah yang disampaikan kepada OJK.

e. Kegiatan audit pasif (*off-site*)

Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga melaksanakan kegiatan Audit pasif (*off-site*), antara lain:

1. Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio keuangan
 2. Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Nasabah
 3. Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik intern maupun ekstern
- f. Pembinaan BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)
- Sepanjang tahun 2016, PT. Bank BPD DIY sebagai salah satu Pembina BUKP telah melakukan pembinaan terhadap 75 (tujuh puluh lima) unit BUKP yang terdapat di wilayah DIY.

Fungsi Audit Ekstern

Ruang Lingkup Audit Ekstern adalah sebagai berikut:

- a. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian intern yang ditemukan selama audit dalam bentuk *Management Letter*.
- c. Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- d. Review atas Hasil Evaluasi Kinerja:
 - Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016
 - Tingkat Kesehatan Bank yang diukur berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011
 - Perkembangan Usaha
 - Rasio-rasio Keuangan
 - Tindak Lanjut Hasil Audit tahun yang lalu

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Bank mengadakan perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Manajemen dan Keuangan pada tahun 2016. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

yang terdaftar di Bank Indonesia dan tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut. Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui dalam RUPS.

Penunjukan KAP tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank BPD DIY dengan KAP, dengan nomor perjanjian: 0150/PW 0100 // 1646/GM/ARY/HESP/VIII/16 tanggal 5 Agustus 2016, tentang Jasa Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2016. PT. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan aspek-aspek mengenai:

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan publik, dan
- e. Komunikasi Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya KAP diwajibkan berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan audit harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. KAP wajib menyampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Laporan Hasil Audit
 - *Management Letter*
 - Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan.
 - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- c. KAP harus membicarakan terlebih dahulu Konsep Laporan Hasil Audit dengan Bank sebelum diterbitkan Laporan Final.
- d. KAP tidak diperkenankan melimpahkan/menyerahkan pelaksanaan tugas serta hasil audit kepada pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Bank.

Laporan Manajemen Risiko

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Informasi mengenai risiko yang melekat dari seluruh kegiatan usaha Bank sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi kerugian yang dihadapi dan mempengaruhi permodalan Bank melalui proses penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko Bank meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bank membangun kerangka dan sistem informasi manajemen risiko yang memadai dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko tersebut merupakan sistem yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja untuk melakukan identifikasi, pengukuran atas potensi kerugian dari risiko yang teridentifikasi, mitigasi yang sudah dilakukan, dan pemantauan risiko berupa laporan dari unit kerja sebagai dasar dalam pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko Kredit/Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit/Pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank yaitu penyaluran kredit/pembiayaan dan aktivitas trisuri yang dapat menimbulkan risiko kredit seperti surat berharga, transaksi antar Bank,

kewajiban komitmen dan kontinjensi. Risiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain kepada debitur baik 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, produk, jenis kredit/pembiayaan, industri, sektor, dan atau wilayah geografi tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank, yang disebut Risiko Konsentrasi Kredit/Pembiayaan.

Risiko Pasar

Bank belum memiliki aset derivatif dan aset devisa, sehingga risiko pasar sangat rendah. Aktivitas trading masih sebagai *niche market* di industri pasar bank dengan kewajiban mengupayakan likuiditas pasar melalui partisipasi secara aktif masih melalui broker. Pengendalian intern dilakukan oleh unit independen untuk memastikan bahwa transaksi dan proses yang terkait dengan market risk taking berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan dan non keuangan, bahkan reputasi Bank dapat terancam.

Bank berusaha untuk meminimalisasi dampak kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem dan kejadian-kejadian eksternal yang dapat mengakibatkan kerugian Bank.

Risiko Likuiditas

Bank tidak pernah mempunyai permasalahan likuiditas dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan baik.

Bank memiliki aset likuid yang mencukupi baik aset likuid primer maupun aset likuid sekunder serta mempunyai sumber pendanaan yang baik. Indikator peringatan dini untuk mengetahui permasalahan likuiditas dilakukan dengan :

- a) Pemantauan Giro Wajib Minimum, pada setiap tengah hari dan sore hari.
- b) Pemantauan Saldo Giro Bank Indonesia, setiap akan melakukan aktivitas trisuri, baik untuk peminjaman dari bank lain maupun penempatan pada bank lain.
- c) Pemantauan Kliring melalui *Early Warning System* dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, untuk mengetahui saldo kliring di Bank Indonesia dalam rangka memantau kecukupan kliring debit

Risiko Strategik

Bank melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko strategik dalam siklus yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, penilaian/pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko. Identifikasi risiko strategik dilaksanakan terhadap seluruh keputusan strategik antara lain terkait dengan keputusan pemberian kredit dan pembiayaan, investasi, pendanaan, kerjasama operasional dengan pihak ketiga, penempatan key person, pembukaan kantor cabang, dan kantor cabang pembantu, penempatan ATM, dan pengeluaran produk dan /atau aktivitas baru.

Indikator/parameter yang digunakan dalam pengukuran profil risiko berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Bank, posisi bisnis Bank di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis. Sedangkan pemantauan risiko dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Isu-isu strategik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis dan memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan selalu dipantau oleh Bank.

Unit independen dalam melaksanakan proses pengendalian risiko, mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh diantara berbagai alternatif strategi yang akan diambil, kepastian pencapaian sasaran, dan penerapan strategi.

Risiko Hukum

Bank melakukan pengendalian risiko hukum dengan melakukan review secara berkala terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank dengan pihak lain. Bank juga menggunakan standar perjanjian yang terkini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi adanya peraturan atau regulasi yang berlaku baik internal maupun eksternal. Bank melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk memperkuat apabila terdapat kelemahan perikatan. Bank melakukan evaluasi kontra-kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dalam rangka menjaga kelangsungan kerja sama yang baik dan menghindari perbedaan persepsi sebagai upaya pemantauan risiko hukum.

Risiko Kepatuhan

Strategi manajemen risiko yang dilakukan Bank untuk menekan risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap semua pegawai mengenai ketentuan-ketentuan internal dan eksternal.

Penerapan manajemen risiko kepatuhan efektif dilakukan dengan dilakukannya sosialisasi, sehingga semua pegawai mengetahui ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan dan perundang-undangan dapat dihindari. Untuk itu secara berkala, Bank mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada pejabat maupun pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan terhadap risiko kepatuhan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi dapat terjadi yang disebabkan karena risiko reputasi itu sendiri dan atau merupakan suatu akibat dari risik-risiko yang lainnya. Pemberitaan negatif terhadap Bank di media massa, situs Bank dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan layanan nasabah, dan kuesioner nasabah ataupun terdapat tuntutan nasabah dapat menyebabkan terjadinya risiko reputasi.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan dengan mengevaluasi kejadian atau masalah yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan kerugian dari masalah tersebut pada masa lalu maupun potensi kerugian akibat risiko reputasi yang terjadi pada masa mendatang. Dalam rangka pengendalian terhadap risiko reputasi, Bank melakukan edukasi kepada

nasabah dan masyarakat serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka membentuk opini reputasi yang positif.

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga.

Bank melakukan pengendalian dengan pendekatan secara emosional kepada nasabah dan pihak ketiga, sehingga perubahan tingkat imbal hasil tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap portofolio dana pihak ketiga.

Risiko Investasi

Risiko Investasi (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Dalam rangka mengendalikan risiko investasi, Bank melakukan pemantauan terhadap pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena akan meningkatkan *stakeholder value* dan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, PT. Bank BPD DIY sebagai usaha yang memiliki kompleksitas tinggi, melakukan pengelolaan risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko tersebut meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui, antara lain evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Penilaian Profil Risiko, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta Laporan Direktur Kepatuhan.
- b. Di samping pengawasan pasif (*off-site*), Direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan sosialisasi manajemen risiko dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar kepada pegawai dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap risiko yang melekat pada setiap individu dan aktivitas pekerjaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku dari setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Selain hal tersebut diatas, manajemen telah melakukan sistem penerimaan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari setiap unit kerja untuk pengelolaan risikonya.
- d. Sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko. Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Level	Jumlah
1	Level 1	254
2	Level 2	66
3	Level 3	16
4	Level 4	26
5	Level 5	3
Total		365

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP), antara lain:

- BPP Manajemen Risiko Secara Umum
 - BPP Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan
 - BPP Manajemen Risiko Operasional
 - BPP Manajemen Risiko Pasar
 - BPP Manajemen Risiko Likuiditas
 - BPP Manajemen Risiko Hukum
 - BPP Manajemen Risiko Strategik
 - BPP Manajemen Risiko Reputasi
 - BPP Manajemen Risiko Kepatuhan
 - BPP Profil Risiko
- b. Dalam rangka mitigasi risiko dan menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank juga menetapkan limit pada tahun 2016, antara lain:
- Kebijakan tentang kewenangan memutus kredit
 - Kebijakan tentang kewenangan penempatan dana
 - Kebijakan tentang pengeluaran biaya
 - Kebijakan tentang pengeluaran kas
 - Kebijakan tentang BMPK
 - Kebijakan tentang KPMM
 - Kebijakan tentang NPL
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- a. Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- b. Bank secara rutin melakukan pengukuran risiko dengan menilai parameter-parameter yang ada dalam aktivitas bisnis Bank, antara lain dengan melakukan *stress testing* dan *back testing*.

- c. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, Bank menerapkan *Asset and Liabilities Management (ALMA)* yang secara rutin dibahas dalam rapat ALCO.
- d. Bank melakukan pemantauan pelaksanaan ORSA (*Operating Risk Self Assessment*) dan LED (*Loss Event Database*). Evaluasi dilakukan dengan mengkaji kembali relevansi *key risk indicator* dengan aktivitas operasional.

Hasil penilaian Profil Risiko secara *self assessment* PT. Bank BPD DIY pada Desember 2016 adalah pada Peringkat 1, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Peringkat Risiko Komposit				
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate To High	High
1	Kredit		√			
2	Pasar	√				
3	Likuiditas	√				
4	Operasional		√			
5	Hukum	√				
6	Strategi		√			
7	Kepatuhan	√				
8	Reputasi	√				

4. Sistem pengendalian intern

Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah :

- a. Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank
- b. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank
- c. Menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
- d. Melakukan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- e. Melakukan kaji ulang yang efektif dan obyektif terhadap kegiatan operasional baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang

- f. Melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit
- g. Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menyusun kebijakan Buku Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0040/OM 1007 tanggal 30 Januari 2012. Pada tahun 2015, Bank telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) terhadap faktor-faktor dan hasil penilaian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	1
2	<i>Good Corporate Governance</i>	1
3	Rentabilitas	1
4.	Permodalan	1
	Peringkat Komposit	1

Hasil yang diperoleh dalam penilaian *self assesment* terhadap 4 (empat) faktor tersebut, Bank mencapai Peringkat Komposit 1 (PK-1), dimana mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat baik atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, PT. Bank BPD DIY telah membuat suatu kebijakan, sistem dan prosedur pemberian kredit besar dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

PT. Bank BPD DIY telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang tertuang dalam kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta Kebijakan Pemberian Kredit sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kebijakan tersebut dievaluasi dan dilakukan pengkinian.

Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.

Berikut adalah penyediaan dana kepada Pihak Ketiga dan penyediaan dana besar posisi Desember 2016 :

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	43	35.309.172.989
2	Kepada Debitur Inti:	15	5.989.632
	a. Individu		
	b. Group		
Catatan: Jumlah total Baki Debet penyediaan dana pihak terkait dan debitur inti baik perorangan maupun group per posisi laporan.			

Rencana Strategis PT. Bank BPD DIY

Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*). Dalam menyusun perencanaan tersebut, Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/3/DPbS tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah.

Penyusunan dilaksanakan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan serta tepat waktu.

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) merupakan suatu perencanaan manajemen selama 5 (lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang. *Corporate Plan* tahun 2011 – 2015 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar PT. Bank BPD DIY dapat mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan dijabarkan setiap tahun dalam Business Plan.

Rencana Korporasi Bank periode 2011 – 2015 disusun berdasarkan data internal dan eksternal masa lalu, serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap industri perbankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Korporasi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang meliputi:

- a. Visi dan misi PT. Bank BPD DIY
- c. Kondisi ekonomi makro dan mikro nasional
- d. Kondisi ekonomi makro dan mikro regional
- e. Analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats*)
- f. Strategi dan target jangka panjang

Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*)

Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, azas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Rencana Bisnis Bank meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif
 - Visi dan misi
 - Arah kebijakan

- Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank
 - Indikator keuangan
 - Target jangka pendek dan menengah
- b. Kebijakan dan strategi manajemen
- Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
 - Kebijakan manajemen
 - Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
 - Strategi pengembangan bisnis
 - Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini
- Penerapan manajemen risiko
 - Penerapan tata kelola yang baik
 - Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas
 - Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
 - Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- d. Sasaran-sasaran meliputi:
- Proyeksi keuangan
 - Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu
 - Rencana pendanaan
 - Rencana permodalan
 - Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
 - Rencana pengembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 - Perubahan jaringan kantor
 - Informasi lainnya

Rencana Bisnis PT. Bank BPD DIY Tahun 2017

Pada tahun 2017, strategi dasar manajemen Bank terkait proses bisnis internal adalah sebagai berikut :

A. Strategi Dasar : memberikan solusi masalah keuangan bagi nasabah

1. Fokus pada Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Menjadi mitra strategis Pemerintah
3. Sektor-sektor prioritas antara lain : kesehatan, pendidikan, perdagangan, industri kreatif, konstruksi, dan infrastruktur.
4. Diferensiasi produk dengan membedakan produk Bank pada atribut non-harga, sehingga menghindari persaingan harga pesaing.

B. Strategi Operasional

1. Memaksimalkan fungsi petugas pemasaran.
2. Meningkatkan kualitas hubungan kemitraan dengan nasabah yang terfokus pada UMKM dan sektor strategis.
3. Meningkatkan jumlah nasabah Kredit/Pembiayaan Swaguna dan Purnakarya.
4. Mempertahankan pengelolaan dana pemerintah.
5. Menjual produk dengan strategi penyesuaian harga yaitu tingkat bunga (*pricing*)
6. Variasi produk perbankan yang kompetitif untuk meningkatkan *fee based income*.
7. Mengembangkan dan menerapkan layanan tanpa kantor (Laku Pandai) untuk membidik golongan masyarakat marginal (*financial inclusion*).
8. Memanfaatkan jaringan yang cukup luas untuk memetakan potensi daerah dan persaingan bisnis perbankan diseluruh wilayah DIY.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

(dalam jutaan)

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY Tahun 2016								
Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2016							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal
Prof. Ainun Na'im, Ph. D	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	35,000*)	141.249
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*)Keterangan : ADRO, BWPT, KRAS, SMCB, TLKM

Kepemilikan Saham Direksi PT. Bank BPD DIY Januari – Desember 2016								
Direksi	Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2016							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Cahya Widi, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Bank:

Keterkaitan Hubungan Keuangan dan Keluarga PT. Bank BPD DIY Tahun 2016			
No.	Keterkaitan	Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
1	Dewan Pengawas dan Direksi dengan Dewan Pengawas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada

2	Dewan Pengawas dan Direksi dengan Direksi Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
3	Dewan Pengawas dan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan)

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY Tahun 2016					
No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.041,31	4	13.132,69
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan dan sebagainya), yang:				
	a. Dapat dimiliki	-	-	4	0,80
	b. Tidak dapat dimiliki	-	-	4	472,61
	Total	3	2.041,31	4	13,606.10

No.	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
1	Di atas Rp 2 M	4	-
2	Di atas Rp 1 M s/d Rp 2 M	-	-
3	Di atas Rp 500 jt s/d Rp 1 M	-	3
4	Rp 500 jt ke bawah	-	-

4. Share option

Tidak terdapat *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif PT. Bank BPD DIY.

Share Option PT. Bank BPD DIY Tahun 2016					
Keterangan /Nama	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu	
	Yang Diberikan (lbr saham)	Yang Telah Dieksekusi (lbr saham)			
Dewan Komisaris	Prof. Ainun Na'im, Ph.D Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A. Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M. Drs. Cahya Widi, M.M. Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	Drs. Arief Yulianto, M.M. Dra. Kustianti, M.M. Ir. Widodo, M.M. Ir. Nur Iswantoro, M.M. Dra. Erna Wukiratun, M.M. Hangkoso, S.E., M.M. Dra. Ch. Dwiani Surastiyati, M.M. Drs. Muhammad Afnan, M.M. Drs. Kwartono Agus Rachmadi, M.Si. Agus Trimurjanto, S.E., M.M. Wahyu Wijanarko, S.E., M.M. Dian Ariani, S.E., M.M. Platy Soulistiyanti, S.E., M.M. Riani Ernastuti, S.E., M.M. Drs. Supriyanto, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2016		
No	Keterangan	Prosentase
1	Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah	4,58
2	Gaji Direktur Tertinggi – Terendah	1,11
3	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi – Terendah	1,11
4	Gaji Dewan Komisaris Syariah Tertinggi - Terendah	1,10
5	Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2,14

Business Continuity Plan

Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis secara garis besar dapat disebabkan oleh faktor bencana alam (*natural disaster*), kerusakan teknis (*technical disaster*), atau perbuatan manusia (*human made disaster*). Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi namun juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis Bank. Bank telah menyusun prosedur penanganan bencana yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Strategi Pemulihan
- b. Dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) PT. Bank BPD DIY
- c. Lampiran Dokumen BCP
- d. Prosedur Respon Darurat
- e. Prosedur Alternatif

Budaya Perusahaan

Dalam rangka menuju visi dan misi yang ingin dicapai, Bank membentuk budaya perusahaan yang wajib dilaksanakan. Budaya perusahaan tersebut adalah :

Integritas	<ul style="list-style-type: none">• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa• Menerapkan kejujuran, keikhlasan, dan menjaga kepercayaan
Sigap	<ul style="list-style-type: none">• Bertindak dengan cepat dan tanggap dalam bekerja• Menerapkan layanan yang peduli, cerdas, dan berbudaya
Tangguh	<ul style="list-style-type: none">• Bekerja keras, dan pantang menyerah dalam segala situasi
Inovatif	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengembangan yang berkelanjutan
Mutu	<ul style="list-style-type: none">• Mengedepankan kesempurnaan dalam semua hasil kerja
Empati	<ul style="list-style-type: none">• Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai
Waspada	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
Antusias	<ul style="list-style-type: none">• Semangat tinggi dalam bekerja untuk mencapai hasil terbaik

Nilai-Nilai Utama Perusahaan

Untuk mendukung Budaya Perusahaan, Bank menyusun nilai-nilai utama perusahaan, yaitu :

R espek	Rasa hormat
A kurat	Tepat
M odern	Visioner/berpikir ke depan
A manah	Terpercaya
H andal	Kuat dan Mampu

Kode Etik

Semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko, maka diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Salah satu upaya memitigasi risiko adalah dengan menetapkan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketaatan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

Bank telah menyusun Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY yang merupakan komitmen Pengurus dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi PT. Bank BPD DIY secara profesional dan beretika tinggi. Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah:

1. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan
2. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada undang-undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada pegawai perusahaan
3. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua pegawai di perusahaan

4. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada Manajemen, Pimpinan, dan Pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik sebagai bagian dari Budaya Perusahaan

Secara garis besar Kode Etik pengurus dan pegawai PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Etika Kerja



2. Isi Kode Etik



Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran sertadan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT. Bank BPD DIY.

PT. Bank BPD DIY telah memiliki *Whistleblowing System* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/KPTS/DP/2012 tentang penerapan Kebijakan Strategi *Anti Fraud*.

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Mekanisme pengelolaan *Whistleblowing System* yang sedang dikembangkan Bank BPD DIY yakni setiap pegawai atau siapa saja yang ingin melaporkan indikasi fraud, sedangkan jika merasa sungkan maka laporan dapat disampaikan melalui SMS atau *e-mail* dengan alamat khusus dengan menggunakan surat ditujukan kepada pengelola *Whistleblowing System*.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi *Whistleblowing System* di internal Bank BPD DIY disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui *website* Bank BPD DIY dan pengiriman surat edaran/memo.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Permasalahan Hukum

Sampai akhir tahun 2016, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di PT. Bank BPD DIY.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Permasalahan Hukum

PT. Bank BPD DIY memiliki permasalahan hukum yang mencakup permasalahan hukum perdata yang dihadapi Perseroan selama periode tahun 2016.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	-
Dalam proses penyelesaian	7	-
Total	7	-

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Shares Option

Selama tahun 2016, PT. Bank BPD DIY tidak melakukan transaksi *Buy Back Shares* maupun *Buy Back Obligasi*.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2016, PT. Bank BPD DIY tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah	4,58
2	Gaji Direktur Tertinggi – Terendah	1,11
3	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi – Terendah	1,11
4	Gaji Dewan Komisaris Syariah Tertinggi - Terendah	1,10
5	Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2,14

Transparansi Informasi Produk dan Jasa

Informasi produk dan jasa PT. Bank BPD DIY didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun pelaksanaan promosi melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya.

Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain:

- a. Media elektronik : *website* , radio, dan televisi
- b. Media cetak : brosur, spanduk, *leaflet*, *billboard*, surat kabar dan majalah
- c. Media lainnya : pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film

Setiap kantor pelayanan telah tersedia informasi produk dan jasa secara tertulis mengenai karakteristik produk Bank dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar pada lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Begitu pula apabila terdapat perubahan terhadap karakteristik produk Bank.

Salah satu prosedur transparansi informasi produk, Bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank secara utuh.
- b. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk Bank yang diberikan.

Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, PT. Bank BPD DIY tidak dapat menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan CSR PT Bank BPD DIY dilaksanakan oleh Grup Corporate Social Responsibility sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0270/OM 1006 tanggal 05 September 2011 tentang Grup Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) PT Bank BPD DIY. Pelaksanaan program CSR PT Bank BPD DIY mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34.

Adapun arah pelaksanaan CSR PT Bank BPD DIY dibagi atas 4 bidang tanggung jawab sosial, yaitu

1. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat (Pengembangan dan Sosial Kemasyarakatan)
2. Tanggung Jawab Terhadap Pegawai dan K3
3. Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Nasabah
4. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Dalam kegiatan penyaluran dana CSR, PT Bank BPD DIY senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program CSR yang dilakukan agar program-program CSR tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Upaya yang dilakukan dengan merancang dan melaksanakan program CSR secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan CSR PT Bank BPD DIY dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan.

a. Pelaksanaan Kegiatan CSR tahun 2016

- Sektor Pendidikan

1. Bantuan pendidikan (beasiswa) kepada siswa SMK/SMA

Bantuan ini diberikan kepada 229 siswa siswi di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Bantuan yang diberikan berupa tabungan pendidikan @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang disalurkan kepada siswa-siswi setingkat SMK/SMA sampai dengan lulus sekolah, dengan tujuan untuk membantu biaya pendidikan untuk siswa tidak mampu, sehingga diharapkan siswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SMK/SMA. Penyaluran dilakukan setiap semester @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bantuan ini disalurkan melalui Kantor Cabang PT Bank BPD DIY dengan rincian sebagai berikut :

- Cabang Sleman : 50 siswa
 - Cabang Utama : 10 siswa
 - Cabang Syariah : 6 siswa
 - Cabang Wonosari : 22 siswa
 - Cabang Senopati : 34 siswa
 - Cabang Bantul : 59 siswa
 - Cabang Wates : 48 siswa
2. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk mahasiswa/ perguruan tinggi.
- a. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk Winda Nur Afini, mahasiswi UGM berprestasi dari kalangan tidak mampu. Beasiswa kepada Winda Nur Afini diberikan sejak tahun 2013, yaitu sejak yang bersangkutan diterima menjadi mahasiswi di Fakultas Biologi UGM, dan akan di berikan sampai lulus kuliah. Winda Nur Afini merupakan siswa berprestasi yang berasal dari SMK Tunas Medika Jakarta Timur yang beberapa kali berhasil menjadi juara Olimpiade Science Terapan Nasional (OSTN) dan *English Speech* Kontes Tingkat Propinsi DKI Jakarta. Karena terserang stroke, ayahnya terkena PHK sehingga tidak dapat membiayai keluarga, sedangkan penghasilan ibunya sebagai pembuat kue juga kurang memadai. Keluarganya saat ini bertempat tinggal di wilayah Siyono Tengah Logandeng Playen Gunungkidul. Pada tahun 2016 ini bantuan yang diberikan berupa uang buku Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 semester (semester VI dan VII).
 - b. Bantuan dana pendidikan untuk 25 mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tersebar di 7 (tujuh) perguruan tinggi di DIY. Bantuan dana pendidikan ini diberikan kepada 25 mahasiswa S1 dari keluarga yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan IPK minimal 2,75 yang tersebar di 7 universitas/perguruan tinggi di wilayah DIY. Beasiswa ini akan diberikan sampai mahasiswa tersebut lulus. Tujuannya adalah untuk memperingan beban biaya pendidikan yang ditanggung, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1. Bantuan dana pendidikan mahasiswa diberikan sebesar @ Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun, dimana penyalurannya dilakukan tiap semester, dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah	Nominal
1	Politeknik Kesehatan Kemenkes (POLTEKES) Yogyakarta	4	24.000.000,00
2	Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa (UST)	4	24.000.000,00
3	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN)	4	24.000.000,00
4	Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)	3	18.000.000,00
5	STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Bethesda	3	18.000.000,00
6	STIM (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen) YKPN	4	24.000.000,00
7	Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada (STAIMS)	3	18.000.000,00
	Jumlah	25	150.000.000,00

- c. Bantuan dana pendidikan untuk 5 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada 5 mahasiswa UNY yang berprestasi namun kurang mampu dengan pemberian beasiswa sebesar @ Rp 3.000.000.- per semester sampai dengan lulus kuliah.
3. Lomba *Museum Speech Contest an program Tour d’Museum 06* bekerjasama dengan Jogja Museum Society. Museum Speech Contest adalah lomba pidato berbahasa Inggris dengan tema museum yang diikuti mulai dari usia SD sampai mahasiswa dengan jumlah peserta 61 orang yang diselenggarakan tanggal 26 April – 15 Mei 2016. Sedangkan untuk program *Tour d’Museum 06* adalah mengunjungi beberapa museum di Area KM 0, yaitu Museum Gedung Agung, Museum Benteng Vredeburg, dan Museum Sonobudoyo. Pengunjung dapat mengikuti tour ini secara gratis, dengan rute Jogja City Mall (JCM) – Area KM.0, dan Area KM.0 - Jogja City Mall (JCM), yang diselenggarakan tanggal 12 – 15 Mei 2016.
4. Bantuan fasilitas pendidikan untuk Sekolah Ramah Anak (SRA) SMP N 1 Minggir. Merupakan bantuan yang diberikan kepada Sekolah Ramah Anak (SRA) SMP N 1 Minggir yang digunakan untuk perbaikan fasilitas fisik yang meliputi renovasi 3 kamar kecil, pengecatan lapangan basket, pengecatan 7 ruang kelas dan melukis mural.
- Sektor Kesehatan
 1. PIPANISASI dan pembuatan bak penampungan air di Kecamatan Prambanan Sleman. Kecamatan Prambanan merupakan daerah dengan keadaan geografi terdiri dari 60% perbukitan dan 40% dataran rendah. Permasalahan yang dihadapi untuk daerah perbukitan adalah kekeringan dan kekurangan air bersih. Saat ini sudah ada jaringan air bersih namun tidak semua warga dapat menikmati fasilitas tersebut karena belum

semua pedukuhan dapat di lalui jaringan pipa. Oleh karena itu dana CSR Bank BPD DIY disalurkan untuk pembangunan jaringan pipa yang selama ini belum dilalui jaringan pipa di Kecamatan Prambanan yang meliputi 3 desa yaitu Desa Gayamharjo, Sambirejo, dan Sumberharjo. Proyek pipanisasi meliputi pembuatan 2 bak penampung dan 1 bak penyaring, pemasangan dan perbaikan pipa, pemasangan meteran, pembuatan sumur bor dan pengadaan pompa.

2. Pembuatan Bak Penampungan Air di Rongkop, Saptosari, dan Girisubo Gunungkidul. Kekeringan merupakan masalah klasik yang dihadapi di daerah Gunungkidul khususnya di Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Girisubo. Pemberian bantuan dropping air menjadi kegiatan ritual setiap tahunnya baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta yang peduli dengan kebutuhan dasar warga masyarakat. Akan tetapi ini hanya bisa sedikit mengurangi kebutuhan harian penduduk karena keterbatasan jumlah yang ada. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan air adalah dengan membangun bak penampungan air hujan atau lebih dikenal dengan PAH. Dalam rangka meringankan masalah kekeringan tersebut maka PT Bank BPD DIY dengan dana CSR memberikan bantuan pembuatan 8 bak PAH di tiga kecamatan yang berada di 8 desa/pedukuhan yaitu Desa Karangwun, Desa Melikan, Desa Bohol, Pedukuhan Pakel, Pedukuhan Legundi, Pedukuhan Pucung, Desa Nglindur dan Desa Jerukwudel.
3. Bantuan 2 Unit Mobil Ambulan untuk PMI Kab Bantul dan PMI Kab Kulon Progo. Bantuan 2 (dua) unit mobil ambulan untuk PMI Kabupaten Bantul dan PMI Kabupaten Kulon Progo ini adalah sebagai wujud nyata kepedulian PT Bank BPD DIY terhadap kesehatan masyarakat. Mobil ambulan ini akan digunakan oleh PMI untuk melayani masyarakat umum di wilayah Bantul dan Kulon Progo, yaitu meliputi pelayanan kesehatan masyarakat (balai pengobatan), transfusi darah, ambulan gawat darurat, dan penanganan tanggap bencana.
4. Bantuan untuk Relokasi Pasar Bendungan Pasar Bendungan yang berlokasi di Wilayah Kulon Progo mengalami kebakaran yang menyebabkan 46 kios dan 364 kapling los tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga ada 345 pedagang yang terkena dampaknya. Berkenaan dengan hal tersebut Pemda Kulon Progo akan melakukan relokasi sementara pasar agar dapat digunakan lagi. Untuk membantu proses relokasi tersebut PT Bank BPD DIY memberikan bantuan melalui program CSR yang akan digunakan untuk pembangunan toilet umum, pembangunan sumur bor dan tower air, serta pembangunan tiang penerangan pasar di 13 titik (lokasi).

- Sektor Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi
 1. Bantuan Ternak kambing untuk Pondok Pesantren Al Hikmah Karangmojo Gunungkidul. Bantuan ini diberikan kepada Pondok Pesantren Al Hikmah Karangmojo Gunungkidul untuk digunakan dalam program pengembangan agrobisnis berupa peternakan kambing dengan penggunaan dana untuk pembelian 13 ekor kambing dan perbaikan kandang.
 2. Bina UKM
 - a. Bina UKM berupa bantuan peralatan membatik untuk kelompok pengrajin batik di Kretek dan Imogiri Bantul. Bantuan dana CSR ini diberikan kepada Kelompok Batik Mulyo Rejeki di Kecamatan Kretek dan Kelompok Batik Tulis Sekar Arum di Imogiri Bantul. Dua kelompok ini memiliki persamaan yaitu merupakan kelompok pengrajin yang berada di dalam desa wisata. Dalam program wisata kreatif tersebut wisatawan dapat melihat proses membatik secara langsung di *showroom* kelompok-kelompok batik. Oleh karena itu PT Bank BPD DIY menyalurkan dana CSR untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif di sentra kerajinan batik pada 2 kelompok tersebut. Bantuan yang diberikan berupa peralatan membatik yang diharapkan akan meningkatkan produktifitas pengrajin batik sehingga meningkatkan perekonomian secara langsung melalui meningkatnya produksi batik maupun secara tidak langsung dengan meningkatkan jumlah wisatawan.
 - b. Bina UKM berupa bantuan peralatan memproduksi keris untuk kelompok pengrajin pendok keris di Imogiri Bantul. Bantuan ini diberikan kepada kelompok pengrajin keris Pamor Suminar berupa peralatan kerja untuk memproduksi keris seperti, gerinda tangan, bor, kompresor, gergaji, kopler dan sebagainya. Penambahan bantuan peralatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sehingga mampu mengangkat ekonomi para pengrajin keris kelompok Pamor Suminar.
 - c. Bina UKM berupa bantuan peralatan tatah sungging untuk kelompok pengrajin tatah sungging di Imogiri Bantul. Kelompok pengrajin tatah sungging Pakel Mandiri merupakan kelompok pengrajin yang memproduksi kerajinan dari kulit seperti wayang kulit, kipas lipat, hiasan dinding dan aneka souvenir dari kulit. Bantuan CSR akan digunakan untuk menambah peralatan kerja dan fasilitas pendukung pemasaran seperti, etalase alumunium kaca, tatah wayang, ganden, cat dasaran dan meja kursi. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi kelompok tatah sungging Pakel mandiri.

3. Hibah pada KUB Tiwi Manunggal di Hargosari Kokap Kulon Progo. KUB Tiwi Manunggal merupakan kelompok usaha bersama yang memproduksi gula semut dengan memiliki anggota 100 orang. Bantuan yang diberikan berupa alat produksi yaitu mesin ayakan gula dan mesin penggiling gula untuk meningkatkan produksi gula semut. Saat ini KUB Tiwi Manunggal belum dapat memenuhi permintaan pasar akan gula semut, sehingga dengan adanya tambahan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar.
4. Desa binaan di Nglingsgo Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo. Desa Wisata Nglingsgo merupakan desa wisata yang menawarkan panorama alam sebagai magnet bagi wisatawan. Desa yang terletak di Kecamatan Samigaluh Kulon Progo ini berada pada ketinggian 900-1000 mdpl sehingga menjadi menarik karena menyajikan wisata alam khas pegunungan yaitu kebun teh milik warga. Selain itu wisatawan juga dapat menikmati pemandangan melalui gardu pandang. Untuk membantu peningkatan program wisata ini program PT Bank BPD DIY memberikan dana hibah dalam bentuk CSR yang akan digunakan untuk pelatihan dan pembangunan warung di kawasan kebun teh yang saat ini menjadi tujuan wisata. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan wisata dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Desa Nglingsgo.
5. Bantuan Bibit Mangrove di Konservasi Mangrove Baros Bantul. Kawasan hutan mangrove Baros merupakan wilayah yang berada pada peralihan antara ekosistem darat dan laut. Adanya pemanfaatan lahan secara berlebihan di wilayah pantai Baros menyebabkan banjir rob, abrasi, pergeseran muara sungai dan berkurangnya habitat hewan. Dampak lainnya adalah terancamnya lahan pertanian karena pengikisan baik oleh aliran sungai maupun gelombang laut serta tanaman yang kering akibat adanya pembatas antara darat dan laut sehingga garam dari air laut menempel pada dedaunan. Penanaman pohon mangrove bertujuan mengurangi dampak tersebut. Oleh karena itu PT Bank BPD DIY dengan program CSR memberikan bantuan dana yang akan digunakan untuk penanaman dan pemeliharaan mangrove di kawasan Baros untuk mencegah abrasi serta mendukung program pemerintah penanaman 1 miliar pohon sebagai tindakan preventif terhadap bencana alam. Penanaman dan pemeliharaan pohon mangrove ini juga dapat mengembangkan eco wisata sehingga berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
6. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif BPRSW Dinsos DIY Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta merupakan UPTD Dinas Sosial DIY yang

memberikan perlindungan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk membantu wanita dengan permasalahan sosial. Selama mengikuti proses rehabilitasi dan perlindungan sosial mereka diberi bekal ketrampilan agar setelah keluar dari BPRSW mampu menjadi wanita mandiri sesuai dengan ketrampilannya. Bantuan yang diberikan dari CSR Bank BPD DIY berupa program bantuan usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan untuk ketrampilan jahit, olahan pangan, dan tata rias/salon untuk para alumni BPRSW sehingga mereka dapat membuka usaha sesuai ketrampilan yang dimiliki dan dapat hidup mandiri.

7. Bantuan untuk Kelompok Desa Prima di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Desa prima merupakan desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan para perempuan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif sehingga para perempuan tersebut dapat mandiri dan memperoleh penghasilan. Usaha produktif yang dijalankan antara lain pembuatan camilan, kelontong, ternak, warung makan, jahit, rias, dagang pasar, kue, gula kelapa, minyak kelapa, tempe, catering, kerajinan tas, angkringan, dan empling mlinjo. Dana CSR dari Bank BPD DIY akan diberikan kepada masing masing kelompok yang kemudian dana tersebut akan digulirkan oleh kelompok kepada para anggotanya untuk modal usaha. Dengan hibah dana CSR ini diharapkan usaha yang saat ini dikelola oleh para anggota kelompok tersebut akan lebih meningkat sehingga tujuan program penanggulangan kemiskinan melalui usaha produktif dapat tercapai.
8. Pembangunan Fasilitas Taman Kuliner Gunung Kidul. Bantuan yang diberikan berupa dana yang digunakan untuk pembangunan panggung pentas, los kios dan branding name di Taman Kuliner Gunungkidul. Dengan tambahan fasilitas ini diharapkan Taman Kuliner Wonosari menjadi sebuah lokasi aktifitas kuliner yang nyaman dan representative bagi masyarakat.
9. Penghematan Penggunaan Material. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, dalam kegiatan operasionalnya, PT Bank BPD DIY tidak menggunakan material yang langsung diambil dari alam (raw materials). Material utama yang digunakan dalam aktivitas operasional Perusahaan terutama untuk keperluan membuat surat menyurat, administrasi pelaporan, informasi rekening nasabah dan lain-lain adalah kertas, alat tulis dan tinta mesin cetak. PT Bank BPD DIY menyadari bahwa penggunaan kertas dan alat tulis secara tidak langsung memiliki dampak terhadap hutan sebagai penyedia bahan baku utama. Atas kesadaran ini, PT Bank BPD DIY selalu berusaha melakukan upaya inisiatif demi kelestarian hutan dalam jangka panjang dengan

mengoptimalkan penggunaan alat tulis dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

10. Efisiensi Konsumsi Energi. PT Bank BPD DIY senantiasa berusaha melakukan upaya pengurangan kebutuhan energi dalam barang dan layanan yang akan dipasarkan. Hal ini dilakukan melalui serangkaian peningkatan kualitas spesifikasi peralatan penunjang yang berada di gedung kantor.
 11. Program Penghijauan. PT Bank BPD DIY menyadari penerapan penghijauan lingkungan merupakan salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian PT Bank BPD DIY senantiasa melakukan program penghijauan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.
- Sektor UKM Center
 1. Hibah dana Bergulir Penguatan Modal Untuk Wirausaha Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII). Program ini merupakan salah satu dukungan PT Bank BPD DIY dalam mencetak wirausahawan muda unggul dari dalam kampus. Dana hibah akan diberikan kepada pemenang program pembinaan kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan sebagian digunakan untuk program dana bergulir berupa pemberdayaan masyarakat kepada usaha UMKM di DIY.
 2. Kompetisi Wirausaha Muda Istimewa Bekerja Sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). PT Bank BPD DIY ikut berperan dalam Program Wirausaha Muda Istimewa yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam bentuk pemberian dana hibah yang diberikan kepada 5 wirausahawan pemula terbaik yang diambil dari kompetisi Program Wirausaha Muda Istimewa. Dengan pemberian dana hibah ini diharapkan lebih memotivasi para wirausahawan pemula dikampus untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.